

SKRIPSI

**PERAN KEPEMIMPINAN LURAH DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI MASYARAKAT PADA BIDANG PENDIDIKAN DI
KELURAHAN MATTAPPAWALIE KAB. BARRU**



OLEH

**NURVADILAH JAMALUDDIN
NIM: 2220203886231020**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

**PERAN KEPEMIMPINAN LURAH DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI MASYARAKAT PADA BIDANG PENDIDIKAN DI
KELURAHAN MATTAPPAWALIE KAB. BARRU**



OLEH

NURVADILAH JAMALUDDIN

NIM. 2220203886231020

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Pendidikan (S. Pd.) pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam
Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Peran Kepemimpinan Lurah Dalam
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada
Bidang Pendidikan Di Kelurahan
Mattappawalie Kab. Barru

Nama Mahasiswa : Nurvadiyah Jamaluddin

Nomor Induk Mahasiswa : 2220203886231020

Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : B-3299/In.39/FTAR.01/PP.00.9/10/2025

Diserahkan oleh

Pembimbing : Dr. Abdul Halik, M.Pd.I (.....)

NIP : 197910052006041003

Mengetahui:

Dekan Fakultas Tarbiyah



Dr. Andar, M. Pd. I.

NIP. 19761230 200501 2 002

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peran Kepemimpinan Lurah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Bidang Pendidikan Di Kantor Kelurahan Mattappawalie Kab. Barru

Nama Mahasiswa : Nurvadiyah Jamaluddin

Nomor Induk Mahasiswa : 2220203886231020

Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

Fakultas : Tarbiyah

Dasar Penetapan Penguji : B-274 /in.39/FTAR.01/PP.00.9/01/2026

Tanggal Kelulusan : 2 Februari 2026

Disetujui oleh :

Dr. Abdul Halik, M.Pd.I (Ketua) (.....)

Dr. Abdullah Thahir, M.Si (Anggota) (.....)

Dr. Mardia, S.Ag., M.Pd.I. (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Tarbiyah

Dr. Abdur, M. Pd. I.

NIP. 19761230 200501 2 002

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

أَمَّا بَعْدُ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur peneliti persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Alhamdulillah atas rahmat, karunia, serta hidayah-Nya peneliti mampu menuntaskan skripsi berjudul " peran kepemimpinan lurah terhadap peningkatan peran serta masyarakat pada bidang pendidikan di kantor kelurahan mattappawalie Kab. Barru" dengan baik dan maksimal. Peneliti sampaikan terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberi dukungan, semangat, serta doa selama keberlangsungan penyusunan skripsi ini. Kepada kedua orang tua peneliti yang selalu memberi dukungan, semangat, serta doa semasa keberlangsungan penulisan skripsi ini. Skripsi ini tidak bisa berjalan lancar tanpa adanya ridha dari kedua orang peneliti. Peneliti menuturkan terimakasih bagi kedua orang tua yang sudah memberi semua kebutuhan serta memberi tempat secara nyaman hingga peneliti sanggup menuntaskan skripsi ini. Sholawat serta salam kepada Rasulullah Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wasallam yang sudah menjadi suri tauladan utama untuk peneliti.

Penyusunan skripsi ini dilangsungkan dengan tujuan agar terpenuhinya salah satu ketentuan untuk menempuh ujian tingkat sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Dalam melangsungkan penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari bahwasanya aktivitas tidak bisa lepas dari doa, dukungan, bantuan, bimbingan, serta semangat yang diberi oleh beraneka ragam pihak baik secara moril ataupun materiil. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih banyak kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj Darmawati, S. Ag, M. Pd. selaku rektor IAIN Parepare yang sudah bekerja keras dalam mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Ahdar, M. Pd.I. selaku dekan Fakultas Tarbiyah atas pengabdianya agar terciptanya kondisi pendidikan yang positif untuk mahasiswa.
3. Dr. Abdul Halik, M.Pd.I selaku Dosen Pembimbing atas seluruh bimbingan, arahan, masukan, serta semangat yang senantiasa diberikan kepada peneliti. Peneliti haturkan terima kasih untuk semua pembelajaran serta motivasi yang diberikan saat perkuliahan maupun selama bimbingan. yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Rasa hormat dan bangga, bisa berkesempatan menjadi mahasiswa bimbingan Bapak.
4. Dr. Dika Tripitasari, S. Pd., M. Pd. selaku ketua Prodi Manajemen Pendidikan Islam yang sudah banyak memberi beraneka ragam masukan semasa berlangsungnya perkuliahan.
5. Dr. Abdullah Thahir, M.Si, selaku Dosen penguji pertama dan Dr. Mardia, S.Ag., M.Pd.I. selaku Dosen penguji kedua yang sudah meluangkan waktu untuk membimbing penulis semasa melangsungkan studi di IAIN Parepare.
6. Bapak dan Ibu seluruh Dosen Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Terutama Bapak dan Ibu dosen Prodi Manajemen Pendidikan Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuan, mendidik, dan membimbing peneliti selama perkuliahan. Rasa hormat dan bangga, peneliti bisa berkesempatan diajarkan dan dibimbing oleh Bapak dan Ibu dosen. Semoga Bapak dan Ibu selalu dilimpahkan kesehatan, kemudahan, dan dalam lindungan-Nya.
7. Seluruh staf Tata Usaha Prodi, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Parepare, yang telah membantu dan memudahkan segala urusan administrasi penelitian semasa berkuliah di Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare.
8. Alwi, S. H, Selaku Lurah mattappawalie yang sudah memberi kesempatan serta memberi bantuan kepada penulis untuk melangsungkan penelitian dalam kaitan dengan penyusunan skripsi ini.

9. Bahtiar, Rijal, dan Yuliana yang sudah memberi kemudahan terhadap jalan peneliti mulai dari awal penelitian hingga selesai dan membantu dalam proses pengambilan data, dan wawancara. Semoga kebaikan Kak Bahtiar, Pak Rijal dan kak Yuliana dibalas oleh Allah dan menjadi keberkahan.
10. Nasir, Juddin, Irmaervina, suriani, S. Sos, dan Astini, S. Pd, M. Pd. Yang telah membantu dalam proses wawancara. Semoga kebaikan bapak Nasir, bapak Juddin, ibu Irma, Ibu Suriani, dan ibu Astini di balas oleh Allah SWT dan menjadi keberkahan.
11. Devitasari, selaku Kakak kandung peneliti yang selalu memberikan semangat dan dukungan agar peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini dengan hasil yang membanggakan keluarga.
12. Semua keluarga peneliti yang senantiasa memberi doa serta dukungan. Semoga kita semua diberi limpahan keberkahan, kesehatan, serta kebahagiaan dalam hidup oleh Allah SWT.
13. Zahra Awalia, Mubassyirah Rasid, Sugratul Adawiah, Wulandari, Febriana, teman-teman Kelas MPI A22 dan teman-teman Sedari SMK yang sudah bersedia selaku tempat berkeluh kesah, saling memberi semangat, serta memberi dukungan semasa tahap perkuliahan serta penyelesaian skripsi.
14. Untuk semua pihak yang turut serta dalam memberi masukan, motivasi, dukungan, serta doa baik secara langsung ataupun tidak langsung yang tidak bisa peneliti sebutkan satu demi satu. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala membalas ketulusan hati serta kebaikan yang sudah diberi terhadap peneliti.

Harapannya, skripsi ini bisa berdampak positif untuk para pembaca, dikarenakan pada skripsi ini terkandung pembelajaran yang peneliti peroleh semasa keberlangsungan penelitian. Pada konteks ini, peneliti bersedia untuk menerima kritik serta saran yang kiranya menjadi pembelajaran agar peneliti mampu berkembang lebih baik lagi.

Barru, 10 Mei 2026 M
22 Dzulqa'dah 1447 H

Penulis



Nurvadilah Jamaluddin
NIM. 2220203886231020



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Nurvadilah Jamaluddin
NIM : 2220203886231020
Tempat/Tanggal Lahit : Doi-Doi, 19 April 2004
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
Fakultas : Tarbiyah
Judul Skripsi : Peran Kepemimpinan Lurah Dalam Meningkatkan
Partisipasi Masyarakat Pada Bidang Pendidikan Di
Kelurahan Mattappawalie Kab. Barru

Menyatakan dengan sungguh-sungguh disertai penuh kesadaran bahwasanya skripsi ini memang merupakan hasil karya saya sendiri. Jikalau kemudian hari terbukti bahwasanya merupakan duplikat, tiruan, plagiat, ataupun diciptakan oleh orang lain. Sebagian ataupun seluruhnya, maka skripsi serta gelar didapat karenanya batal demi hukum.

Barru, 10 Mei 2026 M
22 Dzulqa'dah 1447 H
Penulis



Nurvadilah Jamaluddin
NIM. 2220203886231020

ABSTRAK

Nurvadilah Jamaluddin. *Peran Kepemimpinan Lurah dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Bidang Pendidikan di Kantor Kelurahan Mattappawalie Kabupaten Barru.* (Dibimbing oleh Abdul Halik).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan di Kelurahan Mattappawalie Kabupaten Barru yang dipengaruhi oleh beraneka ragam kondisi ekonomi, lingkungan sosial, tingkat kesadaran masyarakat, serta kepemimpinan lurah. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui peran kepemimpinan lurah terhadap peningkatan partisipasi masyarakat pada bidang pendidikan. Penelitian memakai pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas lurah, perangkat kelurahan, tokoh masyarakat, serta masyarakat setempat. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya lurah sudah berperan sebagai motivator, fasilitator, komunikator, dan koordinator dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan, meskipun peran sebagai inovator belum berjalan optimal. Partisipasi masyarakat lebih dominan pada tahap pelaksanaan melalui dukungan tenaga, moral, dan material, sedangkan keterlibatan dalam perencanaan masih rendah. Temuan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan lurah memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat terhadap pendidikan. Implikasinya, diperlukan penguatan inovasi kepemimpinan dan program pemberdayaan masyarakat agar partisipasi pendidikan dapat meningkat secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kepemimpinan Lurah, Partisipasi Masyarakat, Pendidikan, Kelurahan Mattappawalie.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Landasan Teoritis.....	16
1. Kepemimpinan Lurah.....	16
2. Partisipasi Masyarakat.....	26
3. Pendidikan dalam Masyarakat.....	30
C. Kerangka Konseptual.....	32
D. Kerangka Fikir.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36

C. Fokus Penelitian.....	37
D. Jenis dan Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	39
F. Uji Keabsahan Data.....	40
G. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Profil Kelurahan Mattappawalie.....	45
B. Hasil Penelitian.....	50
1. Kepemimpinan Lurah dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat.....	51
2. Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pendidikan.....	63
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat.....	70
C. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	77
1. Kepemimpinan Lurah dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Bidang Pendidikan.....	77
2. Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pendidikan.....	81
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pendidikan.....	82
BAB V PENUTUP.....	85
A. Simpulan.....	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	IV
BIODATA PENULIS	XXIV

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.1	Penelitian Terdahulu	10
4.1	Jumlah Anak Sekolah Pada Tahun 2025	47
4.2	Jumlah anak yang tamat pada tahun 2025	47
4.3	Sarana Pendidikan	48
4.4	Data Sarana Sekolah di Kelurahan Mattappawalie	48



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Alur Pikir Penelitian	34
3.1	Teknik Analisa Data	43
4.1	Peta wilayah kelurahan mattappawalie	45



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp	Judul Lampiran	Halaman
1	Instrumen Penelitian	V
2	Surat Penetapan Pembimbing Skripsi	XIII
3	Surat Izin Meneliti dari IAIN	XIV
4	Surat Izin Meneliti Dari DPMPTSP	XV
5	Surat Keterangan Selesai Meneliti	XVI
6	Hasil Musrembang Anak	XVII
7	Kartu Kontrol Sumbangan Komite	XVIII
8	Taman Baca	XVIII
9	Perpustakaan Kelurahan	XIX
10	Dokumentasi	XX
11	Biodata Penulis	XXIV

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonema konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اُو	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِي /ـي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
ـي	kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
ـو	dammah dan wau	ū	u dan garis diatas

Contoh :

مَاتَ : māta

رمى : ramā

قيل : qīla

يموت : yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : Rauḍah al-jannah atau Rauḍatul jannah

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : Al-madīnah al-fāḍilah atau Al-madīnatul fāḍilah

الْحِكْمَةُ : Al-hikmah

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجَّج : *Al-Hajj*

نُعَم : *Nu'ima*

أَعْدُو : *'Aduwwun*

Jika huruf ي bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِي : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِي : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (.).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia,

tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ḡilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ

Dīnullah

بِالله

billah

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ

Hum fī rahmmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Dīn al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naşr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naşr Hamīd (bukan: Zaid, Naşr Hamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS .../ ...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
	=	صلى الله عليه وسلم صلعم
	=	طبعة ط

بدون ناشر = دن
 إلى آخرها/إلى آخره الخ =
 جزء ج =

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor).
 Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. :Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan yakni faktor fundamental untuk membentuk kualitas sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, serta berkarakter. Melalui pendidikan, manusia dapat mengembangkan potensi, pengetahuan, serta keterampilan untuk menghadapi tantangan kehidupan. Oleh sebab itu, pembangunan di bidang pendidikan menjadi satu diantara prioritas pokok dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa. Namun, keberhasilan pembangunan pendidikan tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat atau lembaga pendidikan formal semata, tetapi juga sangat ditentukan oleh partisipasi aktif masyarakat dan peran kepemimpinan di tingkat lokal, termasuk di wilayah kelurahan.

Kepemimpinan pada tingkat kelurahan memiliki posisi yang strategis karena lurah berfungsi selaku ujung tombak pemerintahan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Lurah tidak hanya berguna selaku pelaksana administrasi pemerintahan, namun juga berperan selaku penggerak, pembimbing serta motivator masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan, termasuk di bidang pendidikan. Menurut Siagian, keberhasilan suatu organisasi atau lembaga sosial sangat ditentukan oleh kemampuan pemimpin untuk memengaruhi serta mengarahkan anggotanya untuk mencapai tujuan bersama¹. Dengan demikian, keberhasilan suatu program pembangunan termasuk dalam bidang pendidikan sangat bergantung pada sejauh mana pemimpin mampu menggerakkan dan menginspirasi masyarakatnya untuk ikut berpartisipasi.

Secara yuridis, peran kepemimpinan lurah dalam pembangunan pendidikan memiliki dasar hukum yang kuat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan

¹ S.P Siagian, *Teori Dan Praktik Kepemimpinan*, ed. Bumi Aksara (Jakarta, 2019).h 20.

terencana untuk mewujudkan suasana belajar serta proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif untuk pengembangan potensi dirinya untuk mempunyai kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan masyarakat, bangsa, serta beberapa negara². Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi kewenangan kepada pemerintah daerah, termasuk pemerintah kelurahan, untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Pada Pasal 67 huruf b disebutkan bahwa kepala daerah serta perangkatnya wajib “meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat”, yang salah satunya dapat diwujudkan melalui peningkatan kualitas pendidikan di wilayahnya³. Dengan demikian, lurah sebagai pimpinan di tingkat kelurahan memiliki tanggung jawab untuk mendukung program pendidikan, memfasilitasi masyarakat agar terlibat dalam kegiatan belajar, serta menciptakan kondisi sosial yang kondusif bagi peningkatan mutu pendidikan di wilayahnya.

Dalam pandangan Islam, kepemimpinan yakni amanah yang semestinya dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta keadilan. Seorang pemimpin tidak hanya memiliki wewenang, namun juga memiliki tanggung jawab moral serta spiritual terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Hal tersebut ditegaskan pada firman Allah SWT. Q.S. Al-Baqarah:30, yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ
 ۞ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahan:

“ Dan (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat”aku hendak menjadilakan khalifah di bumi”. Mereka berkata “ apakah engkau hendak menjadikan

² Indonesia, “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional” (Jakarta, 2003), h 20.

³ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah” (Jakarta, 2014), Pasal 67 huruf b, h 32-33.

orang yang merusak dan menumpahkan darah, padahal kami senang tiasa bertasbih dengan memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu? “ dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui”⁴

Ayat ini menunjukkan bahwasanya setiap manusia memiliki tanggung jawab selaku khalifah (pemimpin) di bumi. Dalam konteks pemerintahan, seorang lurah memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin yang harus mampu mengelola, membimbing, dan mengayomi masyarakatnya agar mencapai kesejahteraan bersama, termasuk dalam hal peningkatan mutu pendidikan. Seorang pemimpin yang baik harus memahami peran kepemimpinan sebagai bentuk amanah dari Allah SWT yang harus dijalankan dengan keikhlasan dan tanggung jawab.

Selain itu, Al-Qur'an juga memberikan pedoman tentang bagaimana seharusnya seorang pemimpin berinteraksi dan memimpin masyarakatnya dengan penuh kasih sayang, musyawarah, dan kebijaksanaan. Pada Q.S. Ali-Imran:159, yang berbunyi sebagai berikut:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
 ﴿١٥٩﴾ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahan:

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah anpun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau mebulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sungguh, mencintai orang yang bertawakkal.”⁵

⁴ Al Qur'an, "Al-Baqarah," n.d., 30.

⁵ Al Qur'an, "Ali-Imran," n.d., 159.

Ayat ini menegaskan pentingnya sifat lemah lembut, kebijaksanaan, serta semangat musyawarah pada kepemimpinan. Dalam konteks ini, lurah sebagai pemimpin di tingkat kelurahan dituntut untuk bersikap bijak, komunikatif, serta mampu menumbuhkan partisipasi masyarakat melalui pendekatan persuasif dan gotong royong, bukan melalui paksaan. Nilai-nilai kepemimpinan seperti ini sejalan dengan semangat demokrasi partisipatif yang meletakkan masyarakat selaku subjek pembangunan, bukan hanya objek kebijakan. Menurut Kartono, keberhasilan seorang pemimpin bukan hanya diukur dari kemampuannya dalam mengarahkan bawahannya, tetapi juga dari keberhasilannya menciptakan kondisi yang memungkinkan partisipasi masyarakat tumbuh secara alami⁶. Dalam lingkup pemerintahan di tingkat kelurahan, lurah memiliki akses langsung untuk berinteraksi dengan masyarakat, memahami kebutuhan dan potensi mereka, serta mengarahkan energi sosial yang ada agar selaras dengan tujuan pembangunan, termasuk di bidang pendidikan.

Secara empiris, kondisi pendidikan di Kelurahan Mattappawalie, Kabupaten Barru, membuktikan masih adanya tantangan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemimpin lokal. Berdasarkan data kependudukan tahun 2024, total penduduk di Kelurahan Mattappawalie sebesar 1.698 jiwa dimana penduduk Laki-laki sebanyak 828 jiwa serta Perempuan sebanyak 870 jiwa. Dengan rincian tingkat pendidikan sebagai berikut: lulusan SD/ sederajat sebanyak 258 orang, lulusan SMP/ sederajat sebanyak 192 orang, lulusan SMA/ sederajat sebanyak 184 orang, lulusan D-3/ sederajat sebanyak 7 orang, dan lulusan S-1/ sederajat sebanyak 36 orang.

Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Kelurahan Mattappawalie masih memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah. Kondisi ini menggambarkan perlunya peningkatan kesadaran masyarakat atas pentingnya pendidikan selaku sarana mobilitas sosial dan peningkatan kesejahteraan.

⁶ K Kartono, *Pemimpin Dan Kepemimpinan* (Jakarta: Rajawali Press, 2018), H 170.

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh keterbatasan sarana pendidikan, namun juga oleh beraneka faktor sosial yang berkembang di lingkungan masyarakat.

Salah satu faktor yang cukup berpengaruh adalah rendahnya minat belajar sebagian masyarakat, terutama pada usia sekolah, yang disebabkan oleh kurangnya motivasi serta pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang mendukung kegiatan pendidikan. Dalam beberapa kasus, anak-anak lebih memilih membantu orang tua bekerja atau terlibat dalam aktivitas lain daripada meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Selain itu, kondisi ekonomi keluarga juga menjadi faktor yang cukup mempengaruhi tingkat pendidikan masyarakat. Sebagian keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan ekonomi sehari-hari dibandingkan biaya pendidikan anak. Akibatnya, tidak sedikit anak yang harus berhenti sekolah ataupun tidak meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dikarenakan membantu orang tua bekerja untuk memperoleh penghasilan keluarga.

Dari hasil observasi awal di lapangan, di wilayah ini terdapat satu sekolah dasar negeri serta satu sekolah menengah pertama yang menjadi pusat pendidikan formal bagi anak-anak sekitar. Namun, sebagian besar warga harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah atas karena belum adanya sekolah SMA di wilayah kelurahan tersebut. Kemudian, kondisi sarana serta prasarana pendidikan yang ada masih memerlukan peningkatan, baik dari segi bangunan, maupun fasilitas pendukung seperti perpustakaan dan laboratorium sederhana. Kegiatan pendidikan nonformal seperti kelompok belajar, atau pelatihan keterampilan juga belum berkembang secara maksimal. Hal tersebut diakibatkan karena kekurangan inisiatif dan dukungan sumber daya, baik dari pemerintah maupun masyarakat itu sendiri.

Keterbatasan sarana pendidikan ini berdampak terhadap rendahnya partisipasi masyarakat pada aktivitas belajar, terutama bagi anak-anak dari keluarga ekonomi

menengah ke bawah. Pada kondisi seperti ini, peran kepemimpinan lurah menjadi sangat penting untuk menggerakkan masyarakat agar lebih aktif dalam mendukung kegiatan pendidikan, baik secara dukungan moral, material, ataupun keterlibatan langsung pada program pendidikan berbasis masyarakat. Lurah dituntut mampu menjalankan perannya sebagai motivator, fasilitator, komunikator, koordinator dan inovator yang dapat membangun sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat dalam upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih maju dan berdaya saing.

Melihat kondisi tersebut, diperlukan kepemimpinan lurah yang mampu menjadi penggerak utama dalam menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Lurah sebagai pemimpin lokal diharapkan dapat berperan aktif dalam mengarahkan masyarakat agar turut serta mendukung dan mengembangkan kegiatan pendidikan di lingkungannya. Dengan demikian, penelitian berjudul **“Peran Kepemimpinan Lurah dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Bidang Pendidikan di Kelurahan Mattappawalie Kabupaten Barru”** ini diharapkan bisa memberi kontribusi atas perkembangan teori kepemimpinan pemerintahan, mengetahui bagaimana fungsi kepemimpinan lurah terhadap peningkatan partisipasi masyarakat pada bidang pendidikan di Kelurahan Mattappawalie Kabupaten Barru, serta untuk menemukan strategi yang dapat memperkuat hubungan antara kepemimpinan lokal dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Sehingga tercipta rumusan masalah pada penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana peran kepemimpinan lurah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada bidang pendidikan di Kelurahan Mattappawalie Kabupaten Barru?
2. Bagaimana bentuk peningkatan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan di Kelurahan Mattappawalie Kabupaten Barru?

3. Faktor apa saja yang mempengaruhi kepemimpinan lurah terhadap peningkatan partisipasi masyarakat pada bidang pendidikan di Kelurahan Mattappawalie Kabupaten Barru?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran kepemimpinan Lurah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada bidang pendidikan di Kelurahan Mattappawalie Kabupaten Barru.
2. Untuk mengetahui bentuk peningkatan peran serta masyarakat pada bidang pendidikan di Kelurahan Mattappawalie Kabupaten Barru.
3. Untuk mengidentifikasi beberapa faktor yang memengaruhi peran kepemimpinan Lurah terhadap peningkatan peran serta masyarakat pada bidang pendidikan di kantor Kelurahan Mattappawalie Kabupaten Barru.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberi kontribusi atas perkembangan ilmu administrasi publik dan kepemimpinan pemerintahan, terkhusus pada konteks peningkatan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah kelurahan dengan konteks meningkatkan strategi kepemimpinan yang partisipatif.
- b. Sebagai masukan bagi masyarakat agar lebih aktif berperan pada aktivitas pendidikan di wilayahnya.
- c. Sebagai referensi untuk peneliti lain yang tertarik untuk meneliti terkait topik yang serupa di wilayah lain.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Terdapat beberapa penelitian yang sudah dilaksanakan terkait peran kepemimpinan Lurah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Tinjauan penelitian relevan bisa dipakai selaku sumber komparasi atas penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian yang dilakukan oleh Ghina Yulida Putri, Lidia Manalu, dkk. (2025) berjudul *Peran Kepemimpinan Lurah untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Air Tawar Barat Kota Padang*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan lurah yang terbuka dan komunikasi yang baik mampu meningkatkan partisipasi masyarakat. Persamaan Keduanya mengulas perihal fungsi kepemimpinan lurah terhadap peningkatan peran serta masyarakat. Perbedaannya Keduanya mengulas perihal fungsi kepemimpinan lurah terhadap peningkatan peran serta masyarakat⁷.

Penelitian Tetty Lusyana Sinabutar (2024) berjudul *Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pembangunan Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang*. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori Suhardono yang membagi peran pemimpin sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator. Keduanya mengulas perihal bagaimana fungsi kepala desa/lurah terhadap peningkatan peran serta masyarakat, serta keduanya menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi serta dokumentasi. Perbedaan Penelitian ini menggunakan teori peran kepala desa menurut Suhardono (1994:3) yang membagi peran menjadi tiga yakni selaku motivator, fasilitator serta mobilisator⁸.

⁷ Ghina, “Peran Kepemimpinan Lurah Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Air Tawar Barat , Kota Padang” 9 (2025): h 15066-15071.

⁸ T L Sinabutar, “Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang,” 2024, h 06.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitria Ramadhani (2024) berjudul *Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan Desa di Pulau Karanrang Desa Mattiro Bulu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan*. Penelitian ini memakai metode kualitatif disertai teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil penelitian membuktikan bahwasanya peran kepemimpinan kepala desa berdampak atas pelaksanaan pembangunan desa. Persamaan sma-sama Mengulas tentang peran kepemimpinan lurah/kepala desa dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara serta dokumentasi. Perbedaannya Penelitian ini berfokus pada fungsi kepemimpinan kepala desa atas Pembangunan fisik desa.⁹

Penelitian A. Imran, Anwar Parawangi, dan Muhammad Yusuf (2023) berjudul *Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Balle Kecamatan Kahu Kabupaten Bone*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif disertai indikator kepemimpinan selaku motivator, fasilitator, serta mobilisator. Hasil penelitian mengemukakan bahwasanya perlunya peningkatan atas partisipasi masyarakat melalui fungsi kepemimpinan kepala desa. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang nanti dilaksanakan yakni sama-sama Pada kedua penelitian ini mempunyai tujuan untuk meneksplor bagaimana peran kepemimpinan kepala desa serta tingkat peran serta masyarakat. Dalam penelitian ini berfokus penelitian terhadap fungsi kepemimpinan kepala desa berdasarkan aspek motivator, fasilitator serta mobilisator.¹⁰

Penelitian Bela Rismayana (2021) berjudul *Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Desa Mendik Makmur Kecamatan Longkali Kabupaten Paser*. Penelitian tersebut melangsungkan analisis terhadap perilaku dan

⁹ Fitria, “Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Di Pulau Karanrang Desa Mattiro Bulu Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan” (Universitas Muhammadiyah Makasar, 2024), h 06.

¹⁰ A Imran, “Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Balle Kecamatan Kahu Kabupaten Bone,” *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)* 4, no. 6 (2023), h 1324-1333.

karakteristik kepemimpinan kepala desa atas peningkatan peran serta masyarakat dengan indikator inisiatif, motivasi, pembinaan, dan tanggung jawab. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilaksanakan yakni saling mengkaji Menguraikan bagaimana kepemimpinan kepala desa/lurah dalam melaksanakan kewajibannya. Perbedaannya terletak Penelitian ini bertujuan untuk melaksanakan analisa perilaku karakteristik serta kepribadian kepala desa ketika memberi motivasi serta pendapat terhadap masyarakat. Penelitian yang dilaksanakan memakai indikator kepemimpinan berupa inisiatif, motivasi, pembinaan, serta tanggung jawab¹¹.

Berikut merupakan tabel tinjauan penelitian relevan untuk mengulasi persamaan serta perbedaan beberapa penelitian yang telah dilaksanakan dengan penelitian ini:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Ghina Yulida Putri., dkk (2025).	Peran Kepemimpinan Lurah untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Air	Penelitian ini fokus untuk menanggulangi rendahnya peran serta masyarakat terhadap pembangunan lokal.	Keduanya mengulas perihal fungsi kepemimpinan lurah atas peningkatan peran serta masyarakat.

¹¹ Bela, "Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Desa Mendik Makmur Kecamatan Longkali Kabupaten Paser," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 9, no. 1 (2021)2, h 23–36.

No	Penulis	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
		Tawar Barat Kota Padang		
2	Tetty Lusyana Sinabutar (2024)	Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pembangunan Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.	Penelitian ini menggunakan teori peran kepala desa menurut Suhardono (1994:3) yang membagi peran menjadi tiga yakni selaku motivator, fasilitator, serta mobilisator.	Keduanya mengulas perihal bagaimana peran kepala desa/lurah atas peningkatan peran serta masyarakat, serta keduanya memakai teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi serta dokumentasi.
3	Fitria Ramadhani (2024)	Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan Desa di Pulau Karanrang Desa Mattiro Bulu Kabupaten	Penelitian ini berfokus pada peran kepemimpinan kepala desa untuk Pembangunan fisik desa.	Mengulas tentang peran kepemimpinan lurah/kepala desa disertai teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara serta dokumentasi.

No	Penulis	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
		Pangkajene dan Kepulauan		
4	A. Imrah, Anwar Parawangi dan Muhammad Yusuf (2023)	Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Balle Kecamatan Kahu Kabupaten Bone	Dalam penelitian ini berfokus penelitian terhadap fungsi kepemimpinan kepala desa berdasarkan aspek motivator, fasilitator serta mobilisator.	Pada kedua penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengeksplor bagaimana peran kepemimpinan kepala desa serta tingkat partisipasi masyarakat.
5	Bela Rismayana (2021)	Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Desa Mendik Makmur Kecamatan Longkali	Penelitian ini mempunyai tujuan untuk melaksanakan analisa terhadap perilaku karakteristik dan kepribadian kepala desa dalam memberi motivasi serta	Menguraikan bagaimana kepemimpinan kepala desa/lurah dalam melaksanakan kewajibannya.

No	Penulis	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
		Kabupaten Paser	pendapat terhadap masyarakat. Penelitian ini menggunakan indikator kepemimpinan berupa inisiatif, motivasi, pembinaan, serta tanggung jawab.	

Berdasarkan beberapa penelitian relevan yang sudah diuraikan penelitian ini mempunyai unsur kebaruan (*novelty*) yang terletak pada fokus kajiannya terhadap peran kepemimpinan lurah atas peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan, dengan menempatkan lurah sebagai aktor kunci pembangunan sosial berbasis nilai-nilai kepemimpinan islami. Hingga saat ini, mayoritas penelitian tentang kepemimpinan di tingkat pemerintahan lokal lebih banyak berfokus pada aspek administratif, pelayanan public, atau pemberdayaan ekonomi masyarakat, sedangkan bidang pendidikan masih jarang dikaji secara mendalam dari perspektif kepemimpinan lurah. Kebaruan penelitian ini bisa diuraikan menjadi beberapa poin yakni sebagai berikut:

1. Fokus Kontekstual di Tingkat Kelurahan (Mikro Pemerintahan)

Penelitian ini menempatkan lurah sebagai pemimpin pemerintahan terdepan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam konteks pendidikan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya menyoroti peran kepala daerah (bupati, camat, atau kepala dinas pendidikan), penelitian ini mengangkat lurah sebagai sosok yang

menjalankan fungsi kepemimpinan sosial di tingkat paling bawah, namun memiliki pengaruh langsung terhadap tingkat partisipasi warga di bidang pendidikan.

2. Integrasi Konsep Kepemimpinan dan Partisipasi Pendidikan

Penelitian ini menggabungkan dua konsep penting yaitu kepemimpinan partisipatif dan pembangunan pendidikan berbasis masyarakat yang jarang disinergikan dalam konteks penelitian lokal. Pendekatan ini memberikan pandangan baru bahwa keberhasilan program pendidikan di wilayah kelurahan tidak hanya bergantung pada lembaga sekolah, namun juga atas keterampilan kepemimpinan lurah terkait memotivasi, memfasilitasi, dan menggerakkan warga.

3. Pendekatan Nilai-nilai Islam dalam Kepemimpinan

Pemerintahan Lokal Kebaruan lainnya adalah penggunaan landasan normatif dari Al-Qur'an dalam meninjau konsep kepemimpinan. Penelitian ini memandang lurah sebagai khalifah (pemimpin) yang menjalankan amanah Allah SWT sebagaimana termaktub pada QS. Al-Baqarah: 30 dan QS. Ali-Imran: 159. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji kepemimpinan dari perspektif manajerial, tetapi juga menambahkan dimensi etika spiritual dan moralitas Islam sebagai landasan teori dan praktik kepemimpinan di lapangan.

4. Studi Empiris di Kelurahan Mattappawalie Kabupaten Barru

Secara empiris, penelitian ini menawarkan kontribusi baru karena dilakukan di Kelurahan Mattappawalie, Kabupaten Barru, sebuah wilayah yang belum banyak diteliti dalam konteks pendidikan dan kepemimpinan lokal. Penelitian ini akan memberikan gambaran nyata tentang bagaimana kepemimpinan lurah dapat memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan formal dan nonformal, sekaligus mengidentifikasi faktor penghambat serta strategi inovatif yang digunakan di tingkat kelurahan.

5. Model Konseptual Partisipasi Pendidikan Berbasis Kepemimpinan Lokal

Hasil penelitian ini diharapkan dapat melahirkan model konseptual baru mengenai hubungan antara kepemimpinan lurah dan peran serta masyarakat pada pendidikan. Model ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi pemerintah daerah serta peneliti selanjutnya untuk mengembangkan strategi peningkatan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan melalui pendekatan kepemimpinan yang adaptif, komunikatif, dan berbasis nilai religius.

Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada perspektif integratif antara kepemimpinan pemerintahan lokal, pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan, dan nilai-nilai Islam sebagai fondasi etika kepemimpinan. Hasilnya diharapkan tidak hanya memberi kontribusi secara teoritis untuk perkembangan ilmu administrasi publik dan pendidikan masyarakat, tetapi juga memberikan implikasi praktis bagi para pemimpin lokal dalam merancang strategi kepemimpinan yang efektif, beretika, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan warga.

B. Landasan Teoritis

1. Kepemimpinan Lurah

a. Pengertian Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan kemampuan serta kesanggupan seseorang dalam mempengaruhi, menyokong, mengajak, serta menggerakkan dan jikalau perlu memaksa orang lain untuk menerima dampak serta bertindak sesuatu dalam

membentuk tahapan mencapai tujuan yang sudah ditetapkan¹². Kepemimpinan yakni pengikat pada suatu kelompok serta memberikan motivasi agar tercapainya tujuan organisasi. Tanpa adanya kepemimpinan secara efektif (formal ataupun informal) individu ataupun berkelompok cenderung tidak mempunyai arah tujuan yang jelas.

Berlandaskan pendapat Hoyt pada Kartono, kepemimpinan yakni aktivitas ataupun seni dalam memengaruhi orang lain agar bisa diajak kompromi dengan dilandasi kemampuan seseorang agar memberi bimbingan kepada orang lain agar tercapainya beberapa tujuan yang diharapkan.¹³ Berlandaskan Young pada Kartono, kepemimpinan yakni wujud dominasi yang dilandasi oleh kemampuan personal yang mana bisa menyokong ataupun menarik orang lain agar bertindak sesuatu berlandaskan penerimaan oleh kelompoknya serta mempunyai keahlian secara khusus serta tepat untuk situasi yang khusus¹⁴.

Berdasarkan beberapa definisi yang dipaparkan sebelumnya, maka bisa ditarik kesimpulan bahwasanya kepemimpinan yakni kemampuan untuk memengaruhi orang lain, bawahan ataupun kelompok, kemampuan memberi arahan tingkah laku bawahan ataupun kelompok, mempunyai kemampuan ataupun keahlian terkhusus pada aspek yang diharapkan oleh kelompoknya agar tercapainya tujuan organisasi ataupun kelompok.

Beberapa teori dalam kepemimpinan menurut Ghufron antara lain sebagai berikut¹⁵:

1) Pendekatan Karakter (*Trait Approaches*)

¹² Happy, "Manajemen Kepemimpinan Pada Lembaga Pendidikan Islam," *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan)*, 2019, h 43-54.

¹³ Kartono, *Pemimpin Dan Kepemimpinan*, h 20.

¹⁴ Kartono, *Pemimpin Dan Kepemimpinan*, h 22.

¹⁵ Ghufron, "Teori-Teori Kepemimpinan," *Fenomena*, 2020, h .73-78.

Karakter yakni ciri kepribadian pemimpin yang utama mencakup kejujuran, kecerdasan, kemampuan dalam penyelesaian tugas serta penampilan. Pendekatan karakter mengemukakan bahwasanya pemimpin bisa dikenal berlandaskan sifat personal. Seorang pemimpin pada lazimnya akan mendapat penentuan oleh sifat jasmaniah serta rohaniannya. Sehingga sangat penting mengetahui keterkaitan antara keberhasilan seorang pemimpin beserta beraneka ragam sifatnya.

2) Pendekatan Perilaku (*Style Approaches*)

Pendekatan perilaku berfokus pada keberlangsungan analisis perilaku pemimpin, melangsungkan identifikasi elemen-elemen kepemimpinan yang bisa dikaji, dipelajari serta dieksekusi. Pada kazilnya kepemimpinan bisa dipandang selaku suatu tahapan, melalui orang lain yang dipengaruhi oleh pemimpin tersebut agar tercapainya tujuan organisasi.

3) *Transactional Leadership Transformational Leadership*

Ciri khusus dari kepemimpinan transaksional dibuktikan dengan tiga dimensi yakni *contingency reward* (imbalan kontingensi), *active management by exception* (manajemen eksepsi aktif) dan *passive avoidant*. Sedangkan dalam kepemimpinan transformasional diuraikan dalam empat ciri utama yakni kharisma, motivasi inspirasional, stimulasi intelektual serta konsiderasi individual¹⁶.

4) Pendekatan Kontingensi (*Contingency Approaches*)

Teori kontingensi kepemimpinan mengemukakan bahwasanya efektivitas seorang pemimpin ditentukan oleh tiga variabel yakni struktur keperluan

¹⁶ Nur'Aida, "Konsep Kepemimpinan Transformasional," *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 2021, h 840-846.

pemimpin, kendali keadaan pemimpin serta interaksi antara struktur keperluan pemimpin serta kendali keadaan.

Kartono menyatakan bahwa kepemimpinan berfungsi dalam memandu, mengarahkan, membimbing, membangun, memberi ataupun membangkitkan atas motivasi, mengemudikan organisasi, menjalin beraneka ragam jaringan komunikasi yang baik, memberi super visi/pengawasan efisien serta mengantarkan para pengikutnya menuju sasaran yang ingin dicapai sebagaimana ketentuan waktu serta perencanaan¹⁷. Kemudian Rivai dan Mulyadi mengemukakan bahwasanya kegunaan kepemimpinan yakni agar bisa terciptanya visi serta rasa komunitas, mendorong pengembangan komitmen dibandingkan hanya untuk memenuhinya, menginspirasi kepercayaan, mengintegrasikan perspektif yang berlainan, menunjang pembicaraan yang cakap melalui dialog, membantu memakai pengaruh mereka, memfasilitasi, memberi semangat kepada lainnya, menompang tim dan berperilaku sebagai model¹⁸.

Fungsi kepemimpinan juga menyangkut dua hal pokok yakni pengambilan keputusan dan motivasi. Pemimpin harus dapat mengambil keputusan dengan perhitungan yang cermat dan tepat serta dalam waktu yang cepat sehingga harus didukung oleh informasi dan data yang lengkap untuk dapat menggerakkan bawahannya pemimpin harus mampu memberikan motivasi untuk bekerja supaya tujuan dari organisasi dapat tercapai secara efisien.

Berlandaskan Islam, kepemimpinan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Nabi Muhammad SAW merupakan contoh pemimpin yang memiliki sifat amanah, jujur, adil, dan bijaksana dalam

¹⁷ Kartono, *Pemimpin Dan Kepemimpinan*, h 25.

¹⁸ Rivai, *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2019), h

memimpin masyarakat. Allah SWT berfirman pada Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ
 ﴿٥٨﴾ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahan:

*"Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah maha mendengar, dan maha melihat."*¹⁹

Ayat tersebut membuktikan bahwasanya seorang pemimpin semestinya menjalankan amanah dengan adil dan bertanggung jawab terhadap masyarakat yang dipimpinnya.

Menurut pendapat dari Nawawi secara operasional bisa diklasifikasikan atas fungsi pokok kepemimpinan²⁰:

1) Fungsi Instruktif

Pemimpin berfungsi selaku komunikator yang melangsungkan penentuan terkait apa (isi perintah), bagaimana (cara mengerjakan perintah), bilamana (waktu memulai, melaksanakan dan melaporkan hasilnya), serta dimana (tempat mengerjakan perintah) agar nantinya bisa mewujudkan keputusan secara efektif. Sehingga kegunaan orang yang dipimpin hanyalah untuk melangsungkan perintah.

2) Fungsi Konsultatif

¹⁹ Al-Qur'an, "An-Nisa'," n.d., 58.

²⁰ Nawawi, *Motivasi Kepemimpinan Dan Efektivitas Kelompok* (Jakarta: PT Rineka, 2004), h 45-60.

Pemimpin bisa memakai kegunaan konsultatif selaku komunikasi dua arah. Hal tersebut digunakan manakala pemimpin dalam usaha melangsungkan penentuan keputusan yang membutuhkan bahan pertimbangan serta melangsungkan konsultasi dengan beberapa orang yang dipimpinnya.

3) Fungsi Partisipasi

Dalam melangsungkan kegunaan peran serta pemimpin berupaya mendorong beberapa orang yang dipimpin, baik dalam konteks mengambil keputusan ataupun ketika eksekusinya. Setiap anggota kelompok tentunya mendapati kesempatan yang sama untuk turut serta dalam melangsungkan aktivitas yang dipaparkan dari beberapa tugas pokok sebagaimana eksistensi tiap orang.

4) Fungsi Delegasi

Dalam melangsungkan kegunaan delegasi, pemimpin memberi kewenangan dalam melangsungkan pembentukan serta penetapan suatu keputusan. Kegunaan delegasi pada dasarnya merupakan kepercayaan seorang pemimpin terhadap orang yang mendapati kepercayaan pelimpahan kewenangan dengan melangsungkannya penuh tanggung jawab. Kegunaan pendelegasian tersebut semestinya terwujud dikarenakan ada kemajuan serta perkembangan kelompok tidak mungkin bisa terwujud hanya pemimpin seorang diri.

5) Fungsi Pengendalian

Kegunaan pengendalian yakni berasumsi bahwasanya efektivitas pemimpin semestinya bisa mengelola aktivitas anggota secara terarah serta koordinatif, sehingga nantinya timbul potensi tercapainya tujuan bersama secara optimal. Dalam melangsungkan kegunaan pengendalian, pemimpin bisa

mencapai dengan melaksanakan aktivitas bimbingan, pengarahan, koordinasi, serta pengawasan.

Fungsi kepemimpinan yang ada merupakan suatu cara atau kontrol bentuk kepemimpinan seorang pemimpin. Dalam memimpin seorang pemimpin memiliki fungsi yaitu sebagai komunikator atau pemberi perintah, sebagai pemberi arahan, berfungsi untuk mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, memberi kelimpahan kewenangan serta selaku pengendali atas kinerja orang di bawahnya. Sehingga seorang pemimpin memiliki kegunaan serta tanggungjawab yang cukup besar atas keberlangsungan kepemimpinannya, sehingga seorang pemimpin yang berhasil memerlukan keterampilan serta wawasan yang cukup.²¹

Menurut teori *Path-Goal Theory*, macam atau gaya kepemimpinan terdiri dari²²:

1. Kepimpinan Direktif. Tipe ini mempunyai kesamaan dengan bentuk kepemimpinan secara otokratis. Bawahan mengetahui perihal sebenarnyaapa yang diharapkan darinya serta arahan yang terkhusus diberi oleh Pemimpin. Pada model ini tidak ada peran serta dari bawahan.
2. Kepemimpinan yang mendukung (*supportive leadership*) yakni jenis yang bisa untuk menjelaskan sendiri, bersahabat, mudah didekati, serta memiliki perhatian kemanusiaan secara murni terhadap para anggota.
3. Kepemimpinan partisipatif. Gaya kepemimpinan ini tersebut dimana pemimpin berupaya untuk meminta serta memakai masukan dari bawahan. Akan tetapi pengambilan keputusan merupakan kewenangannya.
4. Kepemimpinan yang mempunyai orientasi terhadap prestasi. Dimana melaksanakan penetapan rangkaian tujuan yang menimbulkan tantangan bagi

²¹ Silvia, “Gaya Kepemimpinan Lurah Sebagai Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan” (Universitas Brawijaya Malang, 2014), h 13.

²² Salis Masruhin and Raudhoh, “Kepemimpinan Partisipatif : Literature Review,” *Jurnal Al Mujaddid Humaniora* 8, no. 1 (2022): 82–90.

para bawahan untuk menghasilkan prestasi. Begitupun dengan pemimpin yang senantiasa memberi keyakinan pada mereka bahwasanya mereka bisa melangsungkan tugas pekerjaan agar tercapainya tujuan secara baik serta benar.

Kepemimpinan partisipatif didefinisikan selaku kesamaan kekuatan serta berbagai dalam penyelesaian persoalan bersama bawahan dengan melangsungkan konsultasi dengan bawahan sebelum menetapkan keputusan²³. Kepemimpinan partisipatif mempunyai keterkaitan dengan pemakaian selaku prosedur keputusan yang membolehkan arahan orang lain untuk memengaruhi keputusan pemimpin. Istilah lain yang lazim dipakai untuk berpacu pada aspek kepemimpinan partisipatif mencakup konsultasi, pembentukan keputusan bersama, klasifikasi kekuasaan, desentralisasi, serta manajemen demokratis.

Dalam kepemimpinan partisipatif, kontrol atas penyelesaian persoalan serta penetapan keputusan akan seimbang antara pemimpin serta bawahan, pemimpin serta bawahan saling terlibat dalam penyelesaian persoalan serta penetapan keputusan²⁴. Sehingga kepemimpinan partisipatif mempunyai klasifikasi sebagai berikut:

- 1) Pemimpin memberi dukungan tinggi serta sedikit/rendah pengarahan.
- 2) Posisi kontrol atas penyelesaian persoalan serta penetapan keputusan dipegang secara bergilir antara pemimpin dengan bawahan.
- 3) Peningkatan komunikasi dua arah.
- 4) Pemimpin aktif mendengar bawahan.
- 5) Tanggung jawab penyelesaian persoalan serta penetapan keputusan sebagian besar terhadap bawahan.

b. Kepemimpinan dalam Pemerintahan Kelurahan

²³ A. W Permana and K Karwanto, "Gaya Kepemimpinan Partisipatif Dalam Upaya Meningkatkan Profesionalitas Guru," *Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan* 5, no. 1 (2020): 58.

²⁴ Masruhin and Raudhoh, "Kepemimpinan Partisipatif : Literature Review."h.86

Definisi kelurahan berlandaskan PP No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan yakni kawasan kerja lurah selaku perangkat daerah kabupaten/kota pada kawasan kerja kecamatan²⁵. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang eksistensinya dibawah serta mempunyai tanggung jawab terhadap Bupati/Walikota melalui Camat. Bupati/Walikota melangsungkan pengangkatan lurah dilandasi usulan camat dari Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan yakni unit pemerintahan terkecil yang setara dengan desa. Perbedaan dengan desa yakni kelurahan mempunyai hak atas pengaturan kawasannya secara terbatas. Dalam keberlangsungannya, sebuah desa bisa mendapati transformasi status menjadi kelurahan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, lurah mempunyai tugas untuk membantu camat dalam melangsungkan pemerintahan, pembangunan, serta memberdayakan masyarakat di kawasannya²⁶. Masyarakat kelurahan berkewenangan untuk melangsungkan pengaturan serta pengurusan keperluan masyarakat sekitar berlandaskan asal muasal serta adat istiadat setempat yang di akui serta dihormati pada sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelurahan tercipta dengan memerhatikan ketentuan luas kawasan, jumlah penduduk serta beberapa ketentuan lain yang lebih lanjut diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri. Pembentukan nama serta batas kelurahan termaktub pada Peraturan Daerah sebagaimana pedoman yang sudah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Kepemimpinan lurah sangat menentukan keberhasilan program pembangunan di tingkat kelurahan. Lurah semestinya bisa menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat, memahami kebutuhan masyarakat, serta menggerakkan masyarakat untuk turut serta pada beraneka ragam aktivitas pembangunan, mencakup pada bidang pendidikan.

²⁵ Peraturan Pemerintah, *Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan*, 2005.

²⁶ Undang-undang, "Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," n.d.

c. Peran Lurah

Istilah peran pada “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), peran ataupun tindakan yang diharapkan dipunyai oleh seorang yang mempunyai eksistensi di masyarakat²⁷. Peran yakni aspek dinamis kedudukan (status), jikalau seseorang melangsungkan hak serta kewajibannya sebagaimana eksistensinya, sehingga ia melangsungkan suatu peranan. Kemudian status yakni kumpulan hak serta kewajiban yang dipunyai seseorang jikalau seseorang yang dimaksud melangsungkan hak serta sebagaimana eksistensinya, sehingga ia melangsungkan suatu kegunaan.

Berdasarkan uraian mengenai definisi peran, peran sendiri bisa ditarik kesimpulan selaku tatanan perihal tingkah laku seseorang yang tercipta dari adanya eksistensi jabatan pada organisasi ataupun lembaga pemerintah. Karakter individu bisa memengaruhi bagaimana peran tersebut semestinya dilangsungkan ataupun diperankan pimpinan tingkat atas hingga bawah, dalam hal ini yakni seseorang yang menduduki posisi pada Lembaga kelurahan.

Mengacu pada definisi peran sebelumnya, peran bisa diklasifikasikan menjadi tiga jenis. Berlandaskan Soekanto terdapat beberapa bentuk jenis peran yakni sebagai berikut:

- 1) Peranan aktif, merupakan peran seorang secara utuh untuk selalu aktif dalam melangsungkan suatu pada organisasi. Hal ini bisa dilihat ataupun dinilai berlandaskan eksistensi serta kontribusi pada suatu organisasi.
- 2) Peranan partisipatif, merupakan peran yang dilangsungkan seseorang berlandaskan keperluan ataupun hanya ketika saat tertentu saja.

²⁷ Soekanto. (2002). *Sosiologi Suatu Pengantar Ringkas*. Jakarta : CV Rajawali,” *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang 03 Mei 2019*, h 130

- 3) Peranan pasif, merupakan suatu peran yang tidak dilangsungkan oleh individu. Definisi peranan pasif yakni dipakai selaku simbol pada situasi tertentu pada keberlangsungan hidup masyarakat²⁸.

Menurut Suhardono, peran merupakan patokan seseorang menduduki jabatan²⁹. Adapun peran lurah yakni sebagai berikut:

- 1) Peran selaku motivator, yakni dorongan yang diberi oleh seorang Individu lainnya sedemikiannya, sehingga orang yang memberi motivasi tersebut menuruti ataupun melangsungkan apa yang dimotivasikan secara kritis, rasional serta bertanggungjawab. Kegunaan kepala desa pada motivasi ataupun yang dikenal selaku motivator pada suatu desa sangat diperlukan masyarakat dikarenakan hal tersebut bisa memotivasi warga.
- 2) Peran sebagai fasilitator, memberi bantuan untuk melancarkan tahapan komunikasi sekelompok orang, sehingga mereka dapat memahami atau memecahkan masalah bersama – sama. Bahwa Kepala Desa diharapkan bisa mencapai keperluan yang sifatnya umum untuk masyarakat, fasilitator bisa dianggap selaku wadah agar berlangsungnya suatu program ataupun suatu yang mendesak terjadi di desa, contoh ketersediaan sarana serta prasarana yang pada keberlangsungan pendidikan di kawasan desa.
- 3) Peran sebagai mobilisator, mengarahkan ataupun mendorong dalam melangsungkan suatu yang mempunyai keterkaitan dengan sebuah pembangunan bertujuan untuk kepentingan bersama, Kepala Desa suatu penggerak, pengawas pembangunan, pelapor pembangunan serta peran Kepala Desa sangat penting dalam melangsungkan pendekatan serta menumbuhkan dan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat agar bisa tercapainya pelaksanaan pembangunan yang sudah direncanakan berlandaskan anggaran

²⁸ Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar Ringkas*. Jakarta , h 139.

²⁹ Suhardono, *Teori Peran, Konsep, Derivasi Dan Implikasinya* (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 1994), h 12-20.

pendapatan serta belanja desa (APBD). Peran berfokus pada kegunaan penyesuaian diri serta selaku bentuk suatu tahap.

2. Partisipasi Masyarakat

a. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi artinya “mengambil bagian” ataupun berlandaskan Hoofsteede “*The Taking Part in one or more phase of the process*” (partisipasi) artinya mengambil bagian pada suatu tahapan ataupun lebih dari suatu tahap³⁰. Secara harfiah, asal muasal partisipasi pada Bahasa Inggris yakni *participation* yang artinya peran serta. Pada definisi secara luas, partisipasi bisa berarti selaku wujud peran serta ataupun keikutsertaan secara aktif ataupun proaktif pada suatu aktivitas³¹.

Partisipasi yakni tahap pemberian kontribusi secara sukarela dari suatu kelompok atau organisasi masyarakat dalam menetapkan suatu keputusan dimana masyarakat semestinya terlibat secara emosi serta mental agar tercapainya tujuan yang memberi kesejahteraan pada keberlangsungan hidup mereka. Selain itu partisipasi juga dapat didefinisikan sebagai kesediaan untuk membantu tercapainya tiap program sebagaimana kemampuan tiap orang tanpa perlu pengorbanan atas kepentingan diri sendiri.

Teori partisipasi yakni teori yang perihal tahap keterlibatan individu pada beraneka ragam aktivitas yang mempunyai keterkaitan dengan kemasyarakatan. Terhubung dengan peran individu selaku makhluk sosial yang pada dasarnya tidak bisa terlepas dari kondisi sekitar. Perspektif dari beberapa ahli mengemukakan bahwasanya suatu tahap keterlibatan diri seseorang dengan penuh terhadap tekad yang sudah mendapati kesepakatan bersama yakni suatu

³⁰ Khairuddin, *Pembangunan Masyarakat* (Yogyakarta: Liberty, 1992), h 63.

³¹ Aprilianti, “*Gaya Kepemimpinan Lurah Sebagai Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*”, 2014, h 13.

arti partisipasi berlandaskan perspektif para ahli. Teori partisipasi bisa dinyatakan selaku keterkaitan antara masyarakat dengan sistem kekuasaan pada tahap pembangunan yang mempunyai kesetaraan kolerasi.

Partisipasi dikategorikan diklasifikasikan menjadi dua macam yakni partisipasi sosial serta partisipasi politik. Keterlibatan seseorang pada keberlangsungan hidup sosial yakni bentuk partisipasi sosial. Partisipasi sosial yakni suatu tahap keterlibatan orang secara sukarela dalam organisasi ataupun aktivitas kemasyarakatan dimana ia melibatkan dirinya dengan beraneka ragam individu serta aktivitas yang dilangsungkan dengan konstan. Kemudian definisi dari partisipasi politik yakni aktivitas warga negara yang dilangsungkan berlandaskan nama pribadi yang bertujuan untuk memberi pengaruh terhadap tahap pembentukan keputusan oleh penguasa.

Partisipasi politik bisa dinilai individu ataupun kolektif berlandaskan situasi serta kondisi. Partisipasi politik kerap kali terwujud melalui tahap pemberian suara pada pemilihan umum, turut serta pada kampanye ataupun menjadi anggota partai politik. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwasanya partisipasi politik yakni keterlibatan masyarakat pada aktivitas yang dilangsungkan kelompok pada kehidupan sosial serta politik.

Sedangkan pengertian masyarakat yakni golongan besar ataupun kecil terdiri dari beberapa manusia, yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan mempengaruhi satu sama lain. Menurut Soerjono Soekanto apabila anggota-anggota suatu kelompok, baik kelompok itu besar maupun kecil, hidup bersama sedemikian rupa sehingga merasakan bahwa kelompok yang dimaksud bisa terpenuhinya beberapa kepentingan hidup pokok, sehingga kelompok tersebut dikenal masyarakat setempat ataupun *community*³². Ralph Linton mengemukakan bahwasanya masyarakat yakni tiap kumpulan manusia

³² Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 123-124.

yang sudah hidup serta bekerjasama cukup lama sehingga mereka bisa menilai diri mereka sendiri selaku satu kesatuan sosial disertai beberapa batas yang dikemukakan secara jelas³³.

Conyers mengemukakan peran serta masyarakat yakni alat guna mendapatkan informasi perihal kondisi, kebutuhan serta sikap masyarakat setempat³⁴. Berlandaskan Burns, Hambleton dan Hogget peran serta berguna selaku strategi dalam mendistribusikan aspirasi masyarakat (*voice*) dalam keberlangsungan pemerintahan daerah. Berlandaskan Lee and Mills, definisi penting peran serta yakni pada kegunaannya yakni kegunaan pertama selaku sarana swa edukasi kepada masyarakat perihal beraneka ragam persoalan public. Kegunaan kedua yakni selaku sarana dalam memperlihatkan kestabilan antara masyarakat dengan pemerintah sehingga kepentingan serta pengetahuan masyarakat bisa terserap pada aktivitas pemerintahan.

b. Bentuk Partisipasi

Partisipasi masyarakat bisa diwujudkan dalam beraneka ragam macam, antara lain sebagai berikut³⁵:

- 1) Partisipasi berupa tenaga, yaitu keterlibatan masyarakat pada kegiatan pembangunan secara langsung.
- 2) Partisipasi berupa pikiran, yaitu memberikan ide, saran, serta pendapat pada perencanaan program pembangunan.
- 3) Partisipasi berupa dana ataupun material, yaitu memberi bantuan berupa uang ataupun barang untuk mendukung kegiatan pembangunan.

³³ Melly, "Relations, Structure, Values And Norms In The Society Of The Target Industry In Kampung Sasirangan, Banjarmasin City," *Jurnal Socius*, 2021, h 2-4 .

³⁴ Diana, *Perencanaan Sosial Di Dunia Ketiga* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991), h 147-148.

³⁵ Antonius, "Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Lengkenat Kecamatan Sepauk," *Fokus: Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang* 22, No. 2 (2024): 397–406.

- 4) Partisipasi berupa sosial, yaitu dukungan moral serta keterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.

Menurut Coden dan Uphoff, partisipasi diklasifikasikan menjadi empat macam yakni³⁶:

- 1) Partisipasi pada penetapan keputusan. Partisipasi tersebut mempunyai keterkaitan dengan penentuan alternatif bersama masyarakat agar tercipta kesepakatan perihal beraneka ragam gagasan yang mempunyai keterkaitan atas kepentingan bersama.
- 2) Partisipasi pada pelaksanaan. Partisipasi macam ini yakni terusan dari rencana yang sudah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan ataupun peninjauan.
- 3) Partisipasi pada pengambilan manfaat. Partisipasi macam ini tidak bisa lepas dari kualitas ataupun kuantitas dari hasil keberlangsungan program yang mampu dicapai.
- 4) Partisipasi pada evaluasi. Partisipasi macam ini mempunyai keterkaitan dengan persoalan implementasi program secara keseluruhan agar bisa mengetahui apakah implementasi program yang sudah terencana berlangsung sebagaimana struktur yang sudah direncanakan.

Pada aspek pendidikan, peran serta masyarakat bisa berupa dukungan terhadap kegiatan sekolah, keterlibatan dalam kegiatan pendidikan masyarakat, serta dukungan terhadap program peningkatan kualitas pendidikan.

c. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

³⁶ Mawar Indah Lumban Raja, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Pada Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Begadai Provinsi Sumatera Utara" (Universitas Medan Area, 2023).

Beberapa faktor yang bisa berdampak peran serta masyarakat antara lain:

- 1) Tingkat pendidikan masyarakat
- 2) Tingkat kesadaran masyarakat
- 3) Kepemimpinan pemerintah setempat
- 4) Kondisi sosial ekonomi masyarakat
- 5) Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah

Kepemimpinan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga masyarakat terdorong untuk berperan serta pada beraneka ragam aktivitas pembangunan.

3. Pendidikan dalam Masyarakat

a. Peran Lurah dalam Bidang Pendidikan

Lurah mempunyai fungsi penting untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan di wilayahnya. Walaupun pendidikan secara formal berada di bawah kewenangan pemerintah daerah dan dinas pendidikan, namun lurah tetap memiliki tanggung jawab dalam mendorong masyarakat agar memiliki kesadaran terhadap pentingnya pendidikan. Peran lurah dalam bidang pendidikan sangat strategis, terutama sebagai fasilitator, motivator, dan koordinator di tingkat akar rumput untuk memastikan akses dan kualitas pendidikan bagi warga kelurahan³⁷. Berdasarkan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) kelurahan, lurah berperan dalam pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat, termasuk pendidikan.

Peran lurah dalam bidang pendidikan antara lain:

- 1) Fasilitator Pendidikan: Lurah memfasilitasi sarana serta prasarana pendidikan, terutama yang mempunyai keterkaitan dengan pemberdayaan

³⁷ Peraturan Pemerintah, Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.

masyarakat serta pelayanan publik, seperti mendukung PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) serta pusat aktivitas belajar masyarakat.

- 2) Motivator serta Penggerak (Mobilisator): Lurah berperan memberikan motivasi kepada orang tua agar menyekolahkan anaknya, peningkatan terhadap kesadaran atas keperluan pendidikan, serta menurunkan angka putus sekolah di wilayahnya.
- 3) Pembina Lembaga Pendidikan Non-Formal: Lurah melangsungkan pembinaan serta mengawasi terhadap lembaga kemasyarakatan serta pusat pendidikan non-formal seperti Taman Bacaan, Karang Taruna, dan pusat pelatihan bakat muda.
- 4) Penyedia Data dan Administrasi: Lurah bertugas mengelola data kependudukan, termasuk data anak usia sekolah, yang digunakan untuk memastikan bantuan pendidikan (seperti Beasiswa/PIP) tepat sasaran.
- 5) Pemberdayaan Masyarakat: Lurah mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan fasilitas pendidikan, seperti sarana PAUD atau taman bacaan melalui gotong royong.

b. Pengantar Pendidikan

Pendidikan yakni upaya secara sadar serta terencana agar terwujudnya pembelajaran secara kondusif agar peserta didik aktif untuk melangsungkan pengembangan potensi diri. Berlandaskan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan mempunyai tujuan terhadap pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang taat beriman serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, serta mempunyai keterampilan yang dibutuhkan untuk dirinya, masyarakat, bangsa, serta negara³⁸.

³⁸ Undang-undang, Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, n.d.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yakni gambaran keterkaitan antar konsep yang menjadi dasar dalam penelitian ini. Penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa kepemimpinan lurah sebagai pemimpin pemerintahan tingkat kelurahan memiliki peran strategis dalam menggerakkan dan mengarahkan masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam Pembangunan termasuk dalam bidang pendidikan.

Kepemimpinan yang efektif bisa memotivasi masyarakat untuk terlibat pada kegiatan pendidikan formal dan nonformal melalui komunikasi, koordinasi, serta pemberdayaan. Sehingga, makin baik peran kepemimpinan lurah, diharapkan makin tinggi juga peran serta masyarakat pada sektor pendidikan.

Konsep utama yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

1. Peran Kepemimpinan Lurah

Peran kepemimpinan lurah mencakup kemampuan lurah dalam menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinan yaitu:

- a. Peran sebagai motivator untuk mendorong masyarakat berpartisipasi
- b. peran sebagai fasilitator dalam menyediakan sarana dan kebijakan pendukung pendidikan.
- c. peran sebagai komunikator dengan menjalin hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
- d. Peran sebagai innovator dengan menciptakan ide atau program baru yang mendukung pendidikan.

2. Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pendidikan

Partisipasi merupakan tingkat keterlibatan masyarakat pada mendukung kegiatan pendidikan, meliputi:

- a. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan.
 - b. Dukungan moral dan material terhadap kegiatan sekolah atau pendidikan nonformal.
 - c. Keikutsertaan dalam Lembaga pendidikan (komite sekolah, kelompok belajar, dan kegiatan literasi masyarakat).
3. Upaya Lurah dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Merupakan langkah konkret yang dilaksanakan oleh lurah meliputi:

- a. Sosialisasi pentingnya pendidikan
- b. Kerja sama dengan tokoh masyarakat dan lembaga pendidikan.
- c. Pembentukan program pemberdayaan masyarakat berbasis pendidikan.
- d. Pemberian penghargaan atau apresiasi bagi masyarakat yang berperan aktif.

D. Kerangka Fikir

Kerangka fikir yakni deskripsi alur penelitian perihal keterkaitan antara peran kepemimpinan lurah dengan partisipasi masyarakat dalam bidang penelitian.

1. Tahap Awal

Pendidikan yakni satu diantara indikator fundamental pada pembangunan masyarakat. Namun, partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan sering kali masih rendah karena kurangnya motivasi, fasilitas, dan kesadaran akan pentingnya pendidikan.

2. Tahap Analisis

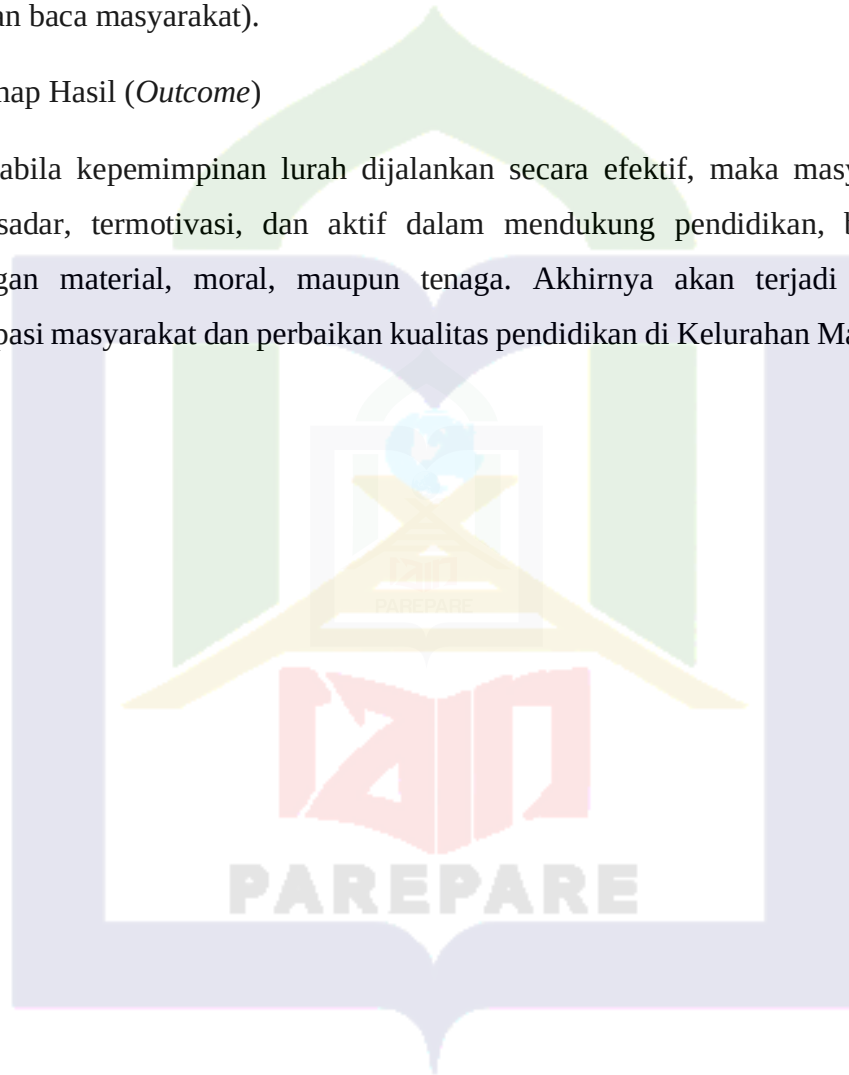
Lurah sebagai pemimpin di tingkat kelurahan memiliki tanggung jawab untuk mendorong masyarakat agar berperan aktif dalam meningkatkan mutu pendidikan. Melalui peranannya sebagai motivator, fasilitator, komunikator, dan inovator, lurah dapat menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.

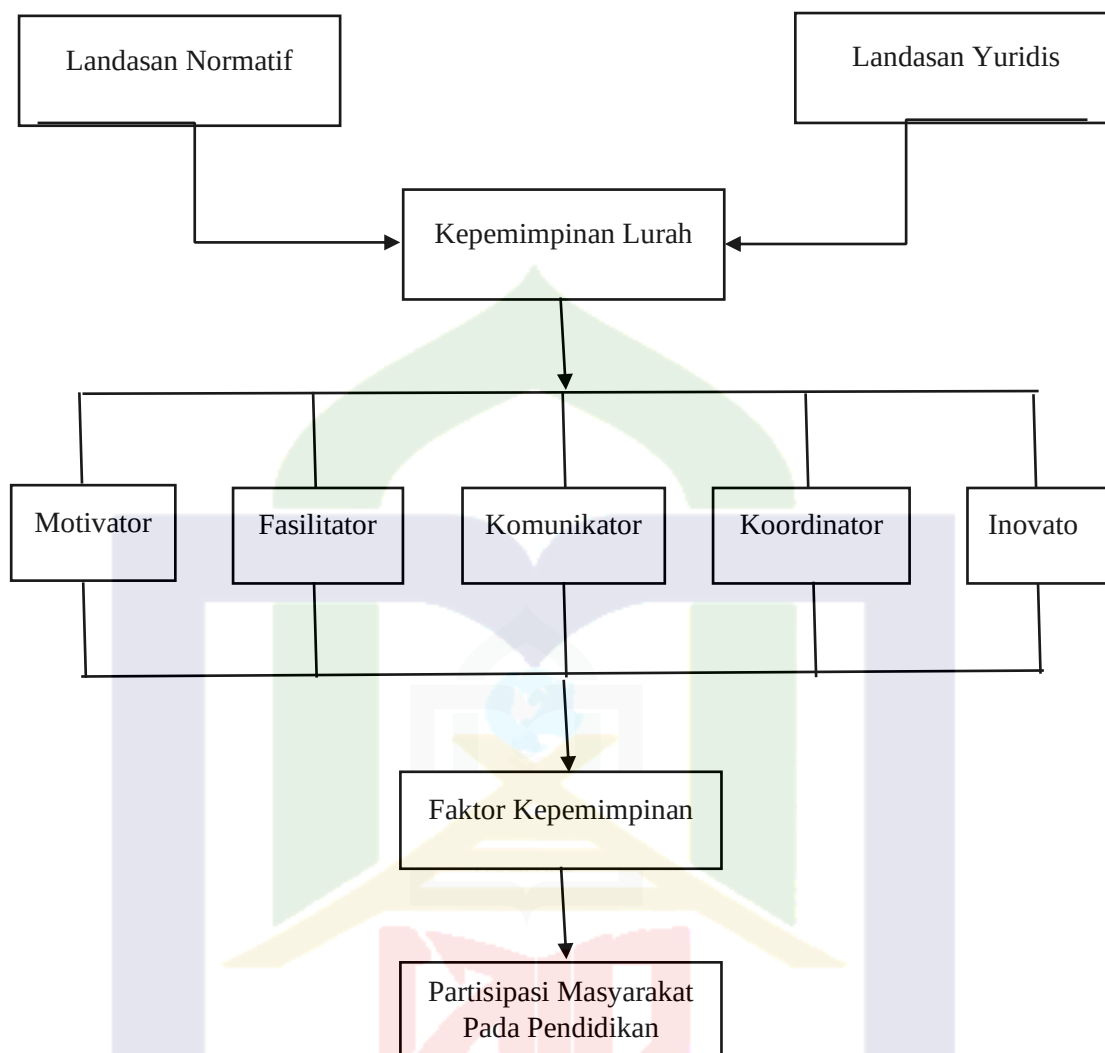
3. Tahap Akses (Upaya Lurah)

Lurah dapat melakukan berbagai langkah strategis seperti sosialisasi pentingnya pendidikan, menjalin kerja sama dengan pihak sekolah, serta membentuk kegiatan masyarakat berbasis pendidikan (misalnya pelatihan literasi, kelas orang tua, atau kegiatan baca masyarakat).

4. Tahap Hasil (*Outcome*)

Apabila kepemimpinan lurah dijalankan secara efektif, maka masyarakat akan lebih sadar, termotivasi, dan aktif dalam mendukung pendidikan, baik melalui dukungan material, moral, maupun tenaga. Akhirnya akan terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dan perbaikan kualitas pendidikan di Kelurahan Mattappawalie.





Gambar 1. Bagan Alur Pikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif disertai pendekatan studi kasus. Metode penelitian kualitatif yakni suatu metode penelitian yang mempunyai tujuan untuk menjelaskan serta melangsungkan analisa fenomena, kejadian sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang dalam konteks individual ataupun kelompok. Tujuan dilangsungkannya penelitian ini yakni agar bisa memahami peristiwa sosial secara komprehensif melalui deskripsi naratif mengenai peran kepemimpinan lurah dan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan.

Pendapat Sugiyono mengemukakan bahwasanya metode penelitian kualitatif kerap kali dikenal selaku metode penelitian naturalistic dikarenakan penelitian dilangsungkan ketika kondisi alamiah (natural setting); dikenal pula metode ethnographi dikarenakan pada mulanya metode ini lebih banyak dipakai terhadap penelitian sektor antropologi budaya; dikenal selaku metode kualitatif, dikarenakan data yang terhimpun serta keberlangsungan analisis cenderung pada kualitatif³⁹. Penelitian ini memakai pendekatan studi kasus untuk melangsungkan kajian terhadap suatu kasus ataupun peristiwa khusus pada masyarakat yang dilangsungkan secara komprehensif agar bisa menelaah landasan, kondisi, serta interaksi yang berlangsung. Studi kasus dilangsungkan pada satu kesatuan sistem berupa suatu program, aktivitas, kejadian, ataupun kumpulan individu yang mempunyai situasi tertentu.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Pada penelitian ini penulis menetapkan lokasi penelitian di Kantor Kelurahan Mattappawalie Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru. Penetapan lokasi ini dengan pertimbangan bahwasanya sumber data di lokasi tersebut telah sesuai

³⁹ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.,” 2022, h 7-8.

dengan tujuan penelitian yang akan mengkaji lebih lanjut mengenai peran kepemimpinan lurah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada bidang pendidikan. Selain itu berdasarkan data jumlah penduduk yang menamatkan pendidikan hingga jenjang SMA masih tergolong kecil disbanding total populasi produktif, kejadian tersebut membuktikan bahwasanya kesadaran masyarakat atas pentingnya pendidikan lanjutan masih perlu ditingkatkan melalui peran aktif pemerintah kelurahan.

2. Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan , sejak 17 April s/d 17 Juni 2026

C. Fokus Penelitian

Pada pendekatan penelitian kualitatif, suatu gejala mempunyai sifat holistic atau keseluruhan dan tidak bisa dipisah-pisahkan, sehingga penelitian tidak sekedar didasarkan pada variabel penelitian namun keutuhan kondisi sosial yang diteliti mencakup segi tempat (*place*), pelaku (*actor*) serta aktivitas (*activity*) yang berkolaborasi secara sinergis⁴⁰. Dikarenakan terlalu luas persoalan pada penelitian ini, maka penelitian dilangsungkan pembatasan pada satu ataupun lebih variabel. Batasan persoalan pada penelitian kualitatif dikenal selaku fokus, yang terkandung pokok persoalan dilandasi pada kepentingan, urgensi serta feasibilitas persoalan yang akan diselesaikan. Adapun fokus pada penelitian ini yakni:

1. Peran kepemimpinan lurah sebagai motivator, fasilitator, komunikator dan inovator dalam mendorong peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan tingkat SMA/Sederajat. Sebagai motivator, mencakup usaha atau strategi lurah dalam menumbuhkan motivasi belajar, memberikan contoh positif, serta menciptakan iklim sosial yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Sebagai fasilitator, lurah berperan dalam menyediakan dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam bidan pendidikan. Sebagai komunikator, Lurah berfungsi sebagai

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022),h 9-10.

penghubung antara masyarakat dengan lembaga-lembaga pendidikan, serta sebagai penyampai informasi kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Melalui komunikasi yang efektif, lurah diharapkan mampu menyampaikan pesan pembangunan pendidikan secara persuasif dan membangun kesadaran kolektif di kalangan warga. Sebagai innovator, Lurah diharapkan mampu menciptakan terobosan dan inovasi sosial dalam bidang pendidikan, seperti menginisiasi program belajar masyarakat, menggalakkan literasi remaja, mengembangkan kemitraan pendidikan, atau mengoptimalkan pemanfaatan ruang publik sebagai pusat kegiatan edukatif.

2. Partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan khususnya pada tingkat SMA/Sederajat. Partisipasi masyarakat dipahami sebagai keterlibatan aktif warga dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, selaku wujud tanggung jawab sosial terhadap kemajuan pendidikan anak-anak di lingkungan mereka. Partisipasi masyarakat ini ditinjau dari beberapa aspek seperti partisipasi dalam dukungan moral dan sosial dengan memberikan dorongan kepada anak-anak untuk melanjutkan pendidikan, partisipasi dalam dukungan material dan finansial, partisipasi dalam kegiatan kelembagaan dan kolaboratif dengan terlibat dalam komite sekolah, kegiatan sosialisasi pendidikan, forum warga, atau kerja sama antara masyarakat dan pihak kelurahan dalam memperjuangkan peningkatan fasilitas pendidikan.

D. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian merupakan kumpulan informasi ataupun fakta yang mempunyai keterkaitan dengan kepentingan penelitian yang tengah dilaksanakan. Pada penelitian ini terdapat dua jenis data yang dibutuhkan yakni data primer serta data sekunder.

1. Data primer adalah data yang didapati secara langsung oleh peneliti dari sumbernya melalui wawancara serta observasi lapangan. Wawancara dilakukan dengan kepada lurah, perangkat kelurahan, tokoh masyarakat dan warga. Sedangkan observasi lapangan dilakukan terhadap kegiatan masyarakat dalam bidang pendidikan.
2. Data sekunder adalah data yang didapati secara tidak langsung ataupun yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain seperti dokumen, laporan, jurnal atau publikasi yang relevan. Pada penelitian ini data sekunder didapati melalui dokumen resmi kelurahan, laporan kegiatan serta arsip pendidikan serta literatur serta hasil penelitian lampau yang selaras dengan penelitian ini⁴¹.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Berlandaskan pendapat Sugiyono teknik pengumpulan data yakni aksi strategis untuk mendapati data⁴². Kendati demikian, teknik pengumpulan data yang dipakai pada penelitian ini yakni:

1. Wawancara Mendalam

Aktivitas wawancara ini peneliti lakukan dengan melangsungkan pengajuan pertanyaan secara langsung terhadap informan yang terdiri atas lurah, perangkat desa dan masyarakat kelurahan Mattappawalie untuk menggali informasi mengenai peran, strategi dan kendala yang dihadapi lurah.

2. Observasi Lapangan

Observasi ataupun kerap kali dikenal selaku pengamatan yakni satu diantara metode untuk mengamati secara langsung bentuk kegiatan dan peran serta masyarakat pada sektor pendidikan. Observasi mengemukakan ilustrasi secara

⁴¹ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*,” Bandung: Alfabeta, 2015, h 308.

⁴² Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta”, h 224-229.

eksplisit atas aktivitas program, tahapan dan peserta. Pada penelitian ini memakai observasi peran serta pasif yakni peneliti datang ke tempat aktivitas masyarakat yang diamati namun tidak terlibat pada aktivitas yang dimaksud.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilaksanakan agar mengabadikan beraneka ragam data yang diperoleh dari situs penelitian. Dokumentasi pada penelitian ini mencakup pengumpulan dokumen berupa profil kelurahan, data pendidikan dan laporan kegiatan masyarakat. Melalui dokumentasi ini peneliti akan makin mudah dalam melaksanakan penyusunan laporan.

F. Uji Keabsahan Data

Sugiyono menyatakan bahwa teknik pemeriksaan keabsahan data ialah tingkatan kepercayaan atas penelitian yang didapati serta kebenarannya bisa dipertanggung jawabkan. Pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif mencakup pengujian kredibilitas (*credibility*), pengujian transferabilitas (*transferability*), pengujian dependabilitas (*dependability*) serta pengujian obyektivitas (*confirmability*)⁴³.

1. Uji Kredibilitas

Pengujian kredibilitas yakni pengujian kepercayaan atas data hasil penelitian kualitatif. Uji kredibilitas ini mempunyai dua kegunaan, yakni kegunaan pertama untuk melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa tingkat kepercayaan penemuan kita dapat dicapai, dan fungsi yang kedua untuk mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan kita dengan membuktikan kenyataan ganda yang tengah diteliti⁴⁴. Pada penelitian ini pengujian kredibilitas memakai triangulasi, yakni pemeriksaan keabsahan data

⁴³ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D, h 267-276.

⁴⁴ Andi, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-ruzzmedia, 2012), h 135.

dengan menggunakan suatu yang lain di luar data penelitian untuk kebutuhan pengecekan data ataupun kerap kali dikenal bahwasanya triangulasi selaku parameter data. Teknik triangulasi yang dipakai pada penelitian ini yakni triangulasi sumber. Sugiyono mengemukakan bahwasanya triangulasi sumber yakni membandingkan serta memverifikasi balik derajat kepercayaan suatu informasi yang didapati dengan waktu serta alat yang berbeda pada penelitian kualitatif. Implementasi metode ini bisa tercapai dengan cara membandingkan data hasil observasi disertai data hasil wawancara, serta dokumentasi. Maksudnya melangsungkan perbandingan terkait apa yang dilangsungkan (responden), dengan keterangan wawancara yang diberikan pada wawancara tetap konstan serta disokong dengan data dokumentasi berupa foto serta data lain seperti jurnal ilmiah, penelitian lampau, serta beberapa teori yang selaras dengan tujuan penelitian ini.

2. Uji Transferabilitas

Uji transferabilitas ialah teknik untuk melangsungkan pengujian validitas eksternal pada penelitian kualitatif. Pengujian ini bisa membuktikan derajat ketepatan ataupun bisa mengimplementasikan hasil penelitian ke populasi ketika sampel tersebut diambil⁴⁵. Dalam mengimplementasikan pengujian transferabilitas pada penelitian ini nantinya peneliti akan memberi paparan secara eksplisit, jelas, serta sistematis atas hasil penelitian. Pemaparan hasil penelitian secara eksplisit, jelas, serta sistematis mempunyai tujuan agar penelitian ini bisa dipahami secara mudah oleh orang lain serta hasil penelitian bisa diimplementasikan pada populasi pengambilan sampel penelitian.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, CV, 2023), h 272.

3. Uji Dependabilitas

Pengujian dependabilitas kerap kali dikenal selaku reliabilitas dalam penelitian kualitatif. Pengujian dependabilitas dilaksanakan dengan mengaudit atas keseluruhan tahap pada penelitian⁴⁶. Pada penelitian ini nanti peneliti akan melaksanakan audit dengan melaksanakan konsultasi kepada pembimbing, selanjutnya pembimbing akan melaksanakan audit menyeluruh tahap penelitian. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kesalahan-kesalahan pada pemaparan hasil penelitian serta tahapan semasa dilaksanakannya penelitian.

4. Uji Obyektivitas

Pengujian konfirmabilitas yakni pengujian objektivitas pada penelitian kualitatif, penelitian bisa disebut objektif jikalau sudah disepakati oleh banyak orang. Pratowo mengemukakan bahwasanya ada empat teknik untuk melaksanakan pengujian konfirmabilitas, yakni peningkatan ketekunan, triangulasi sumber, berdiskusi dengan teman sejawat serta memakai bahan referensi.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data yakni suatu aktivitas secara logis dalam mendeskripsikan data penelitian yang telah ada. Berlandaskan pendapat Sugiyono bahwasanya analisis data yakni tahapan pencarian serta penyusunan secara sistematis data yang didapati dari hasil wawancara, catatan lapangan serta dokumentasi dengan mengelola data ke dalam suatu kategori, pemilihan nama serta apa yang akan dipelajari serta hingga penarikan kesimpulan agar memudahkan pemahaman bagi diri sendiri ataupun orang lain⁴⁷.

⁴⁶ Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, h 126.

⁴⁷ Sugiyono, *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta,”* h 246.

Analisis data dilangsungkan disertai model Miles serta Huberman dalam Sugiyono⁴⁸, yakni:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yakni aktivitas yang dilangsungkan oleh peneliti untuk mendapati data yang dibutuhkan. Pengumpulan data dilangsungkan dengan wawancara pihak yang mempunyai keterkaitan, observasi lapangan serta dari beberapa dokumen dengan validitas ditempat penelitian ataupun secara elektronik.

2. Reduksi data

Data lapangan terkandung pada laporan yang lengkap serta eksplisit. Data serta laporan akan direduksi, dirangkum serta dilangsungkan pemilahan serta pemfokusan dalam memilih yang paling penting lalu pencarian tema ataupun pola (melalui tahap penyuntingan, pemberian kode serta penyusunan tabel). Reduksi data dilangsungkan secara berkelanjutan semasa penelitian berlangsung. Pada tahap ini sesudah pemilahan data dilangsungkan penyederhanaan. Data yang tidak dibutuhkan disortir untuk memudahkan dalam penyajian serta penarikan kesimpulan untuk sementara.

3. Penyajian data

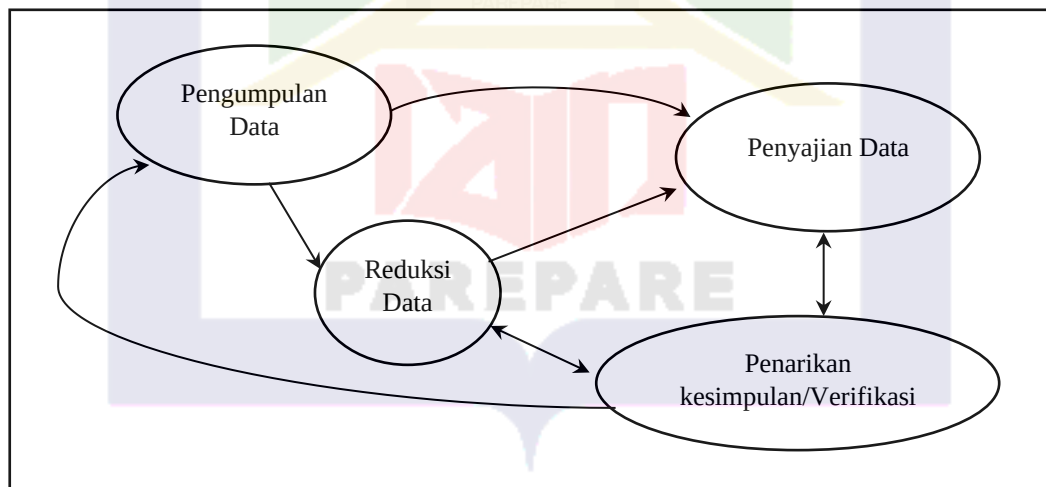
Penyajian data (*display data*) dimaksudkan agar memudahkan peneliti untuk bisa melihat ilustrasi secara menyeluruh ataupun beberapa bagian khusus dari data penelitian. Hal tersebut mencakup pengelolaan data pada bentuk tertentu sehingga data akan terlihat secara jelas serta utuh. Beberapa data tersebut nanti diklasifikasikan untuk dilangsungkan sortir berlandaskan golongan serta penyusunan sebagaimana klasifikasi sejenisnya agar penampilan secara selaras

⁴⁸ Sugiyono, "Data Dan Metoda Pengumpulan Data," *STEI INDONESIA*, 2018, h 240-260.

disertai persoalan yang dikaji, mencakup beberapa kesimpulan sementara yang didapati saat mereduksi data.

4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Pada penelitian kualitatif, dilaksanakannya verifikasi data secara berkelanjutan semasa tahap penelitian berjalan. Semenjak pertama masuk lapangan serta selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema, hubungan persamaan, hipotesis dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang bersifat tentative. Dalam tahapan untuk menarik kesimpulan dari beberapa klasifikasi data yang sudah direduksi serta dipaparkan untuk berikutnya penarikan kesimpulan akhir dalam menjawab persoalan yang dikaji pada penelitian ini. Akan dilaksanakan verifikasi terhadap tiap kesimpulan semasa keberlangsungan penelitian disertai keterlibatan interpretasi dari peneliti.



Sumber: Miles dan Huberman

Gambar 2. Teknik Analisa Data

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kelurahan Mattappawalie

Kode Kelurahan	: 7311061007
Nama Kelurahan	: Mattapapwalie
Kecamatan	: Pujananting
Kabupaten	: Barru
Provinsi	: Sulawesi Selatan
Tahun Pembentukan	: 2013
Dasar hukum Pembentukan	: Perda kabupaten Barru Nomor 1 tahun 2013 tanggal 19 Juni 2013
Peta Resmi Wilayah	: Ada
Koordinat	: 435°15.4'S 11942'39.0"E- 4.587614,119.710843
Batas Wilayah	
a. Sebelah Utara	: Kecamatan Tanete Rilau dan Tanete Riaja
b. Sebelah Selatan	: Desa Jangan-jangan
c. Sebelah Timur	: Kecamatan tanete Riaja dan Desa Pattappa
d. Sebelah Barat	: Kecamatan Tanete Rilau dan Kab. Pangkep

a. Personil

2. Lurah

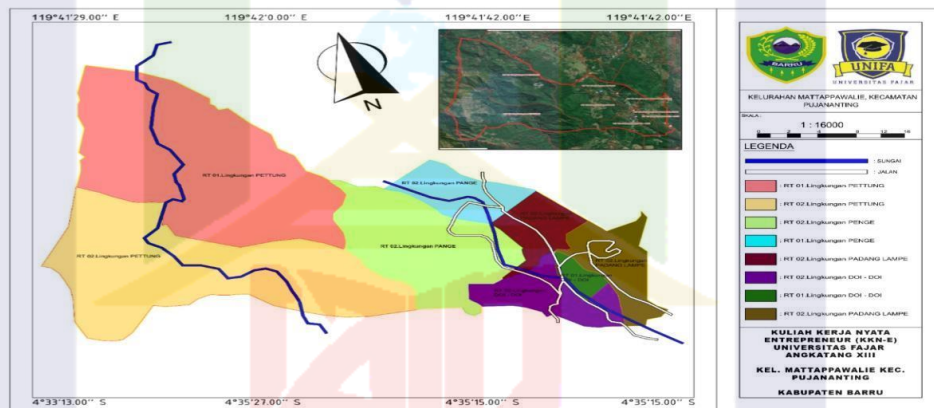
a. Nama	:ALWI, S.H
b. Pangkal / Gol	:Penata / III,c
c. NIP	:19811022 201101 1 009
d. Pendidikan Terakhir	:Strata Satu (S.1)
e. Jenis Kelamin	:Laki-laki

3. Kasi Tata Pemerintahan

- a. Nama :DARWIS, S.Sos
 b. Pangkal / Gol :Penata / III.c
 c. NIP :19671007 200103 1 003
 d. Pendidikan Terakhir :Strata Satu (S.1)
 e. Jenis Kelamin :Laki -Laki

b. Gambaran umum

Peta wilayah kelurahan mattappawalie



Gambar 3. Peta wilayah kelurahan mattappawalie

1. Luas Wilayah : 50,80 KM²
2. Lingkungan : 5
3. RT : 10
4. Sejarah Kelurahan Mattappawalie

Kelurahan Mattappawalie Kecamatan Pujananting awalnya adalah Desa Mattappawalie merupakan pemecahan dari Desa Pattappa pada Tahun 2012. Seiring

berjalannya waktu pada Tahun 2013 Desa Mattappawalie berubah menjadi Kelurahan Mattappawalie berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2013 yang dipimpin oleh Drs. H. ALIMUDDIN selaku menjadi Lurah Mattappawalie pertama. Sehingga Kelurahan Mattappawalie menjadi salah satu kelurahan yang ada di kecamatan Pujananting dan berada dilokasi ibukota Kecamatan Pujananting, serta berada pada 30 Km sebelah Selatan Ibu kota Kabupaten Barru, sedangkan jarak pusat pemerintahan kecamatan dengan Ibukota propinsi Sulawesi Selatan adalah 127 KM dengan tinggi pusat pemerintahan dari permukaan laut 200 M.

Kelurahan Mattappawalie terbagi dari 5 Lingkungan dan 8 RT .dengan rincian sebagai berikut :

Lingkungan Doi-Doi	: 2 RT
Lingkungan Padang lampe	: 2 RT
Lingkungan Pange	: 2 RT
Lingkungan Pettung	: 2 RT
Lingkungan Lappawala	: 2 RT

Sejak terbentuknya pemerintahan Kelurahan Mattappawalie Kecamatan Pujananting hingga saat ini telah dipimpin oleh :

1. Drs. H. ALIMUDDIN (2013 – 2021)
 2. H. LADIRE, S.Sos (2021 S/D 2022)
 3. H. ABDU RAHMAN, S.Pd. MM (2022-2023) (Plt.Lurah)
 4. SURIANI, S.Sos (2023-2026)
 5. Alwi, S.H (2026-Sekarang)
-
- | | |
|-------------------|--------------|
| 5. Jumla Penduduk | : 1.675 Jiwa |
| a. Laki – laki | : 815 Jiwa |
| b. Perempuan | : 860 Jiwa |
| c. Jumlah Anak | : 514 Jiwa |

c. Pendidikan

a. Jumlah Anak Sekolah Pada Tahun 2025

Tabel 2. Jumlah Anak Sekolah Pada Tahun 2025

Tingkat Usia	Jumlah		Keterangan
	Sekolah	Tdk Sekolah	
PAUD 0 – 6 Thn	158	13	Orang
SD 7 – 13 Thn	155	5	Orang
SMP 14 – 15 Thn	88	6	Orang
SMA/SMK 16 – 18 Thn	74	11	Orang
JUMLAH	475	35	Orang

b. Jumlah anak yang tamat pada tahun 2025

Tabel 3. Jumlah anak yang tamat pada tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah jiwa
1	Tamat SD/ sederajat	258
2	Tamat SMP/ sederajat	192
3	Tamat SMA/ sederajat	184
4	Tamat D-3/ Sederajat	7

5	Tamat S-1/Sederajat	31
6	Tamat S-2/Sederajat	2

c. Sarana Pendidikan

Tabel 4. Sarana Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
PAUD /KB/TK	5 Unit	Pos Paud Restu, KB Nur Indah, KB Permata Hati, TK PRGI Bampae, TK Dharmawanita Doi-Doi
SD/MI	3 Unit	UPTD SDN 151 Barru, UPTD SDN 154 Barru, UPTD SDN 163 Barru
SLTP	1 Unit	UPTD SMPN 27 Barru
SMK	1 Unit	UPT SMK Negeri 4 Barru

d. Data Sarana Sekolah di Kelurahan Mattappawalie

Tabel 5.Data Sarana Sekolah di Kelurahan Mattappawalie

No	Nama Sekolah	Lokasi / Alamat	Jumlah Siswa	Keterangan
1.	Pos PAUD Restu	Lingk. Padang lampe	16 Orang	
2.	KB. Permata Hati	Kampung baru . Padang Lampe	10 Orang	
3.	KB. Nur Indah	Lingk. Pange	21 Orang	
4.	TK. PGRI Bampae	Bampae, lingk. Pange	24 Orang	

5.	TK. Dharma wanita Doi-Doi	Lingk. Doi-Doi	41 Orang	
6.	UPTD SDN 151 Barru	Lingk. Doi-Doi	123 Orang	
7.	UPTD SDN 154 Barru	Bampae, Lingk. Pange	68 Orang	
8.	UPTD SDN 163 Barru	Lingk. Pettung	27 Orang	
9.	UPTD SMPN 27 BARRU	Lingk. Doi-Doi	264 Orang	
10	UPT SMKN 4 Barru	Lingk. Padang Lampe	235 Orang	

B. Hasil Penelitian

Bagian ini membahas hasil penelitian yang diperoleh peneliti melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai kepemimpinan lurah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan di Kelurahan Mattappawalie. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga data yang diperoleh berasal dari hasil wawancara dengan lurah, perangkat kelurahan, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi terhadap kondisi sosial masyarakat serta aktivitas pemerintah kelurahan dalam bidang pendidikan.

Penelitian kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan pengalaman, pandangan, dan realitas yang dialami oleh informan di lapangan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih rinci mengenai bentuk

kepemimpinan lurah dan bagaimana pengaruhnya terhadap partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan.

1. Kepemimpinan Lurah dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan, yaitu lurah, perangkat kelurahan, tokoh masyarakat, dan masyarakat Kelurahan Mattappawalie. Informan yang diwawancarai terdiri dari Ibu Yuliana, Pak Bahtiar, Pak Rijal, Bapak Nasir, Ibu Irmaevina, Bapak Juddin, Ibu Suriani, dan Ibu Astini. Hasil wawancara tersebut digunakan untuk mengetahui bagaimana kepemimpinan lurah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan.

a. Lurah sebagai Motivator

Peran lurah sebagai motivator terlihat dari upaya lurah dalam memberikan dorongan dan motivasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan lurah Mattappawalie bapak Alwi, diperoleh keterangan bahwa:

“sebagai pemimpin lurah adalah jabatan yang penuh dengan tantangan, seorang lurah itu bagaimana melayani, memimpin atau dia bisa memberikan pelayanan terhadap masyarakatnya mulai dari sejak dalam kandungan samapi iya meninggal.”⁴⁹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa lurah memandang kepemimpinan bukan hanya sebagai tugas administratif semata, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang pendidikan. Lurah juga menjelaskan bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi masa depan masyarakat sehingga pemerintah kelurahan terus

⁴⁹ Alwi, S. H., lurah Mattappawalie, Kec. Pujananting, Kab. Barru, Sulsel, wawancara dikantor kelurahan Mattappawalie, 30 April 2026.

berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan.

Dalam wawancara selanjutnya, bapak lurah Alwi, S. H., menjelaskan:

“Memberikan edukasi contoh edukasi yang diberikan adalah bahwa pendidikan itu adalah hal yang penting dan itu merupakan suatu alat untuk mencapai cita-cita kedepannya dan Sosialisasi memberikan gambaran-gambaran disetiap ada acara atau rapat/pertemuan. Intinya memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pendidikan itu sangat penting.”⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terlihat bahwa pendekatan yang dilakukan lurah bersifat persuasif melalui komunikasi langsung kepada masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial. Lurah memanfaatkan forum musyawarah, rapat, dan kegiatan masyarakat sebagai sarana untuk memberikan motivasi dan edukasi mengenai pentingnya pendidikan.

Selain itu, bapak Alwi, S. H., juga menjelaskan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dorongan kepada masyarakat yang kurang mampu agar tetap melanjutkan pendidikan melalui sekolah rakyat maupun bantuan pendidikan lainnya.

“Memberikan dorongan dan semangat bahwa pendidikan itu wajib dan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak, itu lah yang harus kita tuangkan bahwa pendidikan itu sangat penting maka masyarakat harus sekolah.”⁵¹

Pernyataan tersebut juga didukung oleh hasil wawancara dengan Ketua PKK Kelurahan Mattappawalie, Ibu Marwah, yang menyatakan:

“Lurah selalu mengingatkan kami agar terus memberikan motivasi kepada masyarakat, khususnya para orang tua, supaya lebih memperhatikan pendidikan anak. Dalam setiap pertemuan PKK maupun kegiatan kemasyarakatan, beliau

⁵⁰ Alwi, S. H., lurah Mattappawalie, Kec. Pujananting, Kab. Barru, Sulsel, wawancara dikantor kelurahan Mattappawalie, 30 April 2026.

⁵¹ Alwi, S. H., lurah Mattappawalie, Kec. Pujananting, Kab. Barru, Sulsel, wawancara dikantor kelurahan Mattappawalie, 30 April 2026.

mengajak kami untuk menyampaikan pentingnya pendidikan agar anak-anak tidak putus sekolah.”⁵²

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa motivasi yang diberikan lurah tidak hanya dilakukan secara langsung kepada masyarakat, tetapi juga melalui kerja sama dengan PKK sebagai mitra pemerintah kelurahan. Ketua PKK berperan menyampaikan kembali pesan-pesan mengenai pentingnya pendidikan kepada masyarakat, khususnya para orang tua, melalui berbagai kegiatan PKK dan pertemuan kemasyarakatan sehingga upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan dapat menjangkau lebih banyak warga.

Selanjutnya, pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan perangkat kelurahan. Ibu Yuliana menyatakan:

“Pak lurah sangat memotivasi masyarakat, terutama masyarakat yang kurang mampu diarahkan ke sekolah rakyat supaya tidak putus sekolah.”⁵³

Pak Bahtiar juga menyampaikan:

“Pak lurah selalu memotivasi masyarakat atau orang tua siswa terkait pentingnya pendidikan bagi anak-anak.”⁵⁴

Sementara itu, Pak Rijal menjelaskan:

“Pak lurah sangat memotivasi masyarakat supaya anak-anak tetap sekolah dan tidak putus sekolah.”⁵⁵

⁵² Marwah, Ketua PKK Kelurahan Mattappawalie, , Kec. Pujananting, Kab. Barru, Sulsel, wawancara di rumah Ibu marwah, 03 Juli 2026

⁵³ Yuliana, Aparat kelurahan, Kec. Pujananting, Kab. Barru, Sulsel, wawancara dikantor kelurahan Mattappawalie, 30 April 2026.

⁵⁴ Bahtiar, Aparat Kelurahan, Kec. Pujananting, Kab. Barru, Sulsel, wawancara dikantor kelurahan Mattappawalie, 30 April 2026.

⁵⁵ Rijal, Aparat Kelurahan, , Kec. Pujananting, Kab. Barru, Sulsel, wawancara dikantor kelurahan Mattappawalie, 30 April 2026.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa lurah menjalankan perannya sebagai motivator melalui pendekatan persuasif, komunikasi langsung, serta pemberian edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan. Peran motivasi yang dilakukan lurah menunjukkan adanya kepedulian pemerintah kelurahan terhadap peningkatan kesadaran masyarakat dalam bidang pendidikan.

Berdasarkan hasil observasi pada kegiatan Musrenbang Anak, peneliti menemukan adanya upaya pemerintah kelurahan dalam memberikan dorongan kepada masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap pendidikan dan perlindungan anak. Hal ini terlihat dari berbagai usulan masyarakat terkait pentingnya edukasi mengenai pernikahan usia dini, pencegahan pergaulan bebas, kekerasan terhadap anak, serta pentingnya pendidikan bagi anak-anak di Kelurahan Mattappawalie.

Hal tersebut sejalan dengan konsep kepemimpinan partisipatif yang menekankan pentingnya komunikasi interpersonal dalam membangun kesadaran dan keterlibatan masyarakat⁵⁶. Selain itu, Masruhin dan Raudhoh menjelaskan bahwa kepemimpinan partisipatif menempatkan pemimpin sebagai penggerak yang mampu memotivasi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan sosial dan pembangunan⁵⁷.

b. Lurah sebagai Fasilitator

Selain sebagai motivator, lurah juga menjalankan perannya sebagai fasilitator dalam mendukung kegiatan pendidikan masyarakat. Peran fasilitator terlihat dari

⁵⁶ Wibowo, T. "Kepemimpinan Partisipatif dalam Pemerintahan Lokal." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 12, no. 1 (2024): 67–75

⁵⁷ Masruhin, Salis dan Raudhoh. "Kepemimpinan Partisipatif: Literature Review." *Jurnal Al Mujaddid Humaniora* 8, no. 1 (2022): 82–90

upaya pemerintah kelurahan dalam membantu masyarakat memperoleh akses pendidikan serta menyediakan fasilitas penunjang pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Alwi, S.H diperoleh keterangan:

“kami hanya memfasilitasi perpustakaan kalau fasilitas masalah keuangan tidak ada intinya kelurahan hanya perpanjangan tangan dari pemerintah kalau memang ada masyarakat butuh untuk kayak pendidikan kita carikan solusi kelurahan hanyalah fasilitator. Taman baca ada dilingkungan Doi-Doi dan lingkungan Padang Lampe.”⁵⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kelurahan berupaya menjadi penghubung antara masyarakat dengan bantuan pendidikan yang tersedia. Lurah juga menjelaskan bahwa pemerintah kelurahan membantu masyarakat yang mengalami kesulitan pendidikan melalui pendekatan langsung kepada sekolah dan keluarga siswa.

Keterangan lebih lanjut dari bapak Alwi, S. H., selaku lurah mattappawalie menyatakan bahwa:

“Kami memberikan atau mencari solusi pembiayaan seperti beasiswa ada anak sekolah yang tidak mampu kita carikan solusinya bagaiman, ada anak-anak yang tidak mau sekolah kita terus dorong dia, kita datangi sekolahnya kita tanya gurunya kenapa bisa begini contoh kemarin ada siswa yang tidang ingin sekolah kita datangi kita tanyak apa dan bagaimana, dia memilih ikut orang tuanya merantau .”⁵⁹

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ketua PKK Kelurahan Mattappawalie, Ibu Marwah, yang menyatakan:

“Pemerintah kelurahan selalu mendukung kegiatan PKK yang berkaitan dengan pendidikan. Jika ada penyuluhan atau kegiatan untuk anak dan orang tua,

⁵⁸ Alwi, S. H lurah Mattappawalie, Kec. Pujananting, Kab. Barru, Sulsel, wawancara dikantor kelurahan Mattappawalie, 30 April 2026

⁵⁹ Alwi, S. H., lurah Mattappawalie, Kec. Pujananting, Kab. Barru, Sulsel, wawancara dikantor kelurahan Mattappawalie, 30 April 2026

lurah memberikan fasilitas, membantu koordinasi, dan menerima usulan kami untuk dibahas dalam Musrenbang.”⁶⁰

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa peran lurah sebagai fasilitator tidak hanya diwujudkan melalui penyediaan sarana pendidikan, tetapi juga melalui dukungan terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh PKK. Dukungan berupa penyediaan fasilitas, koordinasi, dan penerimaan usulan masyarakat menunjukkan adanya kerja sama antara pemerintah kelurahan dan PKK dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan.

Selanjutnya, perangkat kelurahan juga menjelaskan hal serupa. Ibu Yuliana menyatakan:

“Kelurahan memfasilitasi masyarakat mulai dari kendaraan untuk mengantar anak sekolah sampai perpustakaan dan taman baca.”⁶¹

Pak Bahtiar juga menjelaskan:

“Ada Perpustakaan, taman baca dilingkungan Padang Lampe dan Doi-Doi.”⁶²

Namun, berdasarkan hasil wawancara mengenai penggunaan fasilitas taman baca dengan Pak Ahrul selaku pengelola taman baca juga menjelaskan bahwa:

“kehadiran taman baca untuk sekarang ini tidak terlalu memiliki dampak positif karena anak-anak cenderung ke gadget atau hp. Anak-anak kadang-kadang datang berkunjung dan kadang-kadang juga tidak”⁶³.

⁶⁰ Marwah, Ketua PKK Kelurahan Mattappawalie, , Kec. Pujananting, Kab. Barru, Sulsel, wawancara di rumah Ibu marwah, 03 Juli 2026

⁶¹ Yuliana, Aparat kelurahan, Kec. Pujananting, Kab. Barru, Sulsel, wawancara dikantor kelurahan Mattappawalie, 30 April 2026.

⁶² Bahtiar, Aparat Kelurahan, Kec. Pujananting, Kab. Barru, Sulsel, wawancara dikantor kelurahan Mattappawalie, 30 April 2026.

⁶³ Ahrul, Pengelola Taman Baca, Kec. Pujananting, Kab. Barru, Sulsel, wawancara ditaman Baca Kelurahan , 03 Juli 2026

Berdasarkan hasil observasi, fasilitas perpustakaan dan taman baca memang tersedia meskipun masih sederhana. Keberadaan fasilitas tersebut menunjukkan adanya perhatian pemerintah kelurahan terhadap peningkatan literasi masyarakat dan akses pendidikan anak-anak. Akan tetapi, untuk saat ini dampaknya kurang terasa maksimal karena anak-anak cenderung lebih fokus pada penggunaan gadget (Hp). Kondisi ini berdampak pada ketidakstabilan jumlah pengunjung, dimana anak-anak kadang-kadang datang berkunjung dan kadang-kadang juga tidak.

Peran fasilitator tersebut sesuai dengan konsep community-based development yang menekankan pentingnya pemerintah sebagai fasilitator dalam pembangunan masyarakat⁶⁴. UNESCO juga menjelaskan bahwa pendidikan berbasis masyarakat membutuhkan dukungan pemerintah lokal dalam menyediakan fasilitas dan akses pendidikan yang merata⁶⁵.

c. Lurah sebagai Komunikator

Peran lurah sebagai komunikator terlihat dari cara lurah menyampaikan informasi kepada masyarakat dan menerima aspirasi masyarakat terkait pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan lurah Mattappawalie bapak Alwi, S. H menyatakan:

“Kami menyampaikan informasi melalui media sosial, pertemuan atau rapat, lewat kepala lingkungan itu cara mensosialisasikan atau menyampaikan.”⁶⁶

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa lurah menggunakan berbagai media komunikasi untuk menjangkau masyarakat. Selain komunikasi secara langsung,

⁶⁴ Lestari, P. “Community-Based Development dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan.” *Jurnal Pembangunan Masyarakat* 9, no. 2 (2022) 89–98

⁶⁵ UNESCO. *Community-Based Education Report*. Paris: UNESCO Publishing, 2022

⁶⁶ Alwi, S. H., lurah Mattappawalie, Kec. Pujananting, Kab. Barru, Sulsel, wawancara dikantor kelurahan Mattappawalie, 30 April 2026

pemerintah kelurahan juga memanfaatkan media sosial dan grup WhatsApp untuk menyampaikan informasi pendidikan kepada masyarakat.

Ibu Irmaervina selaku masyarakat menjelaskan:

“Pak lurah sering membagikan informasi beasiswa pendidikan di grup WhatsApp masyarakat.”⁶⁷

Selain menyampaikan informasi, bapak Alwi, S. H juga berusaha membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat.

“Kalau ada masyarakat menyampaikan aspirasi atau keluhan terkait pendidikan, kami respon cepat.”⁶⁸

Pernyataan tersebut juga didukung oleh hasil wawancara dengan Ketua PKK Kelurahan Mattappawalie, Ibu Marwah, yang menyatakan:

"Komunikasi antara pemerintah kelurahan dengan PKK berjalan dengan baik. Setiap ada program yang berkaitan dengan pendidikan, kami selalu diajak berdiskusi sehingga informasi yang disampaikan kepada masyarakat menjadi sama dan tidak menimbulkan kesalahpahaman."⁶⁹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa lurah tidak hanya membangun komunikasi secara langsung dengan masyarakat, tetapi juga menjalin komunikasi yang baik dengan PKK sebagai mitra pemerintah kelurahan. Melalui koordinasi dan diskusi yang dilakukan sebelum pelaksanaan program, informasi yang disampaikan kepada masyarakat menjadi lebih terarah, seragam, dan mudah dipahami sehingga dapat meminimalkan kesalahpahaman dalam pelaksanaan program pendidikan.

⁶⁷ Irmaervina, Masyarakat, Kec. Pujananting, Kab. Barru, Sulsel, wawancara di rumah Ibu Irmaervina, 2 Mei 2026

⁶⁸ Alwi, S. H, lurah Mattappawalie, Kec. Pujananting, Kab. Barru, Sulsel, wawancara di kantor kelurahan Mattappawalie, 30 April 2026

⁶⁹ Marwah, Ketua PKK Kelurahan Mattappawalie, , Kec. Pujananting, Kab. Barru, Sulsel, wawancara di rumah Ibu marwah, 03 Juli 2026

Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan tokoh masyarakat. Bapak Juddin menyatakan:

“Beliau cukup baik artinya sangat peduli kepada masyarakat dan bisa merespon cepat apa yang dikeluhkan sebagai kepala dusun untuk mengenai hal-hal yang dikeluhkan warga.”⁷⁰

Ibu Suriani, S. Sos selaku masyarakat juga menyampaikan:

“Lurah cepat menanggapi kalau ada permasalahan masyarakat atau keluhan masyarakat.”⁷¹

Komunikasi yang dilakukan lurah menunjukkan adanya hubungan yang cukup baik antara pemerintah kelurahan dan masyarakat. Hal tersebut penting karena komunikasi yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dwivedi dkk. menjelaskan bahwa komunikasi publik yang baik mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dan kepercayaan publik terhadap pemerintah⁷². Oleh karena itu, kemampuan komunikasi lurah menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan.

d. Lurah sebagai Koordinator

Peran koordinasi terlihat dari upaya lurah dalam membangun kerja sama dengan sekolah, tokoh masyarakat, dan orang tua siswa dalam menyelesaikan masalah pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak lurah Alwi, S. H keterangan:

⁷⁰ Juddin, Tokoh Masyarakat, Kel. Mattappawalie, Kec. Pujananting, Kab. Barru, Sulsel, wawancara, di rumah bapak Juddin 2 Mei 2026

⁷¹ Suriani, S. Sos, Masyarakat, Kel. Matappawalie, Kec. Pujananting, Kab. Barru, Sulsel, wawancara di rumah ibu Suriani, 4 Mei 2026

⁷² Dwivedi, Yogesh K., dkk. “Digital Communication and Public Trust.” 2021

“Kami melakukan diskusi atau musyawarah dengan sekolah, oratua/wali murid untuk mencari solusi.”⁷³

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ketua PKK Kelurahan Mattappawalie, Ibu Marwah, yang menyatakan:

"Dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan, Bapak Lurah selalu mengoordinasikan PKK, kader Posyandu, tokoh masyarakat, dan pihak sekolah agar kegiatan dapat berjalan dengan baik. Pembagian tugas juga disampaikan dengan jelas sehingga semua pihak mengetahui perannya masing-masing.”⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa koordinasi yang dilakukan lurah tidak hanya melibatkan pemerintah kelurahan, tetapi juga berbagai unsur masyarakat seperti PKK, kader Posyandu, tokoh masyarakat, dan pihak sekolah. Pembagian tugas yang jelas serta koordinasi yang dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan menunjukkan adanya kerja sama yang baik antarlembaga dalam mendukung peningkatan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan

Bapak Nasir selaku Tokoh Masyarakat menyatakan:

“Lurah sering mengajak masyarakat untuk berpartisipasi iya menyampaikan dalam kegiatan Musyawarah atau musrembang.”⁷⁵

Ibu Irmaervina selaku Masyarakat juga menjelaskan:

⁷³ Alwi, S. H., lurah Mattappawalie, Kec. Pujananting, Kab. Barru, Sulsel, wawancara dikantor kelurahan Mattappawalie, 30 April 2026

⁷⁴ Marwah, Ketua PKK Kelurahan Mattappawalie, , Kec. Pujananting, Kab. Barru, Sulsel, wawancara di rumah Ibu marwah, 03 Juli 2026

⁷⁵ Nasir, Kel. Mattappawalie, Kec. Pujananting, Kab. Barru, Sulsel, wawancara dirumah bapak Nasir, 2 Mei 2026

“Lurah mengajak masyarakat mengikuti kegiatan pendidikan dan sering membagikan informasi pendidikan melalui Media sosial.”⁷⁶

Berdasarkan hasil penelitian, koordinasi yang dilakukan lurah cukup baik karena melibatkan masyarakat, sekolah, dan perangkat kelurahan. Namun, koordinasi tersebut masih bersifat situasional dan belum dilaksanakan melalui program pendidikan yang terstruktur.

Berdasarkan hasil observasi kegiatan Musrembang Anak, peneliti melihat adanya koordinasi antara pemerintah kelurahan, forum anak, masyarakat, dan pemerintah setempat dalam menyampaikan berbagai aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dalam forum tersebut dibahas berbagai permasalahan seperti anak putus sekolah, pernikahan dini, penyalahgunaan narkoba dan rokok pada usia sekolah, serta kurangnya fasilitas pendidikan dan kegiatan positif bagi anak-anak.

Peran koordinasi tersebut sesuai dengan konsep collaborative governance yang menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah publik⁷⁷. OECD juga menjelaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah lokal dan masyarakat dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan pembangunan sosial⁷⁸.

e. Lurah sebagai Inovator

Berdasarkan hasil penelitian, aspek inovasi dalam kepemimpinan lurah masih belum maksimal. Bapak lurah Alwi, S.H menyatakan:

“Kalau inovasi belum tapi kalau kegiatan ada karena inovasi itu membuat sesuatu yang belum ada jadi ada, tapi kegiatan selalu karna dimana-mana kalau kita pergi pertemuan apa pasti diberikan dorongan kepada masyarakat sekolah,

⁷⁶ Irmaervina, Masyarakat, Kec. Pujananting, Kab. Barru, Sulsel, wawancara di rumah ibu Irmaervina, 2 Mei 2026

⁷⁷ Ansell, Chris dan Alison Gash. *Collaborative Governance Revisited*. New York: Routledge, 2020.

⁷⁸ OECD. *Public Governance Review*. Paris: OECD Publishing, 2021

silahkan sekolahkan anaknya yang belum sekolah tolong disekolahkan kalau tidak bisa sampai kuliah minimah SMA sederajat lah kalau memang ada masyarakat kurang mampu kita tunjuk sekolah gratis atau beasiswa”⁷⁹

Pernyataan tersebut juga didukung oleh hasil wawancara dengan Ketua PKK Kelurahan Mattappawalie, Ibu Marwah, yang menyatakan:

”Sampai saat ini memang belum ada program baru yang bisa dikatakan sebagai inovasi di bidang pendidikan karena Bapak Lurah masih dalam tahap penyesuaian sebagai pemimpin. Namun, beliau selalu melibatkan PKK dalam berbagai kegiatan pendidikan dan terbuka terhadap usulan-usulan yang dapat dikembangkan menjadi program ke depan.”⁸⁰

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun belum terdapat inovasi baru yang secara khusus dikembangkan oleh pemerintah kelurahan, lurah telah berupaya membangun kerja sama dengan PKK dan membuka ruang bagi berbagai masukan dari masyarakat. Keterlibatan PKK dalam setiap kegiatan pendidikan menjadi langkah awal dalam merancang program-program yang lebih inovatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masa mendatang.

Ibu Yuliana Selaku aparat kelurahan juga menjelaskan:

“Ada kegiatan, tetapi belum ada inovasi khusus.”⁸¹

Pak Rijal selaku aparat kelurahan menyatakan:

“Belum ada program baru karena lurah masih baru menjabat.”⁸²

⁷⁹ Alwi, S. H lurah Mattappawalie, Kec. Pujananting, Kab. Barru, Sulsel, wawancara di kantor kelurahan Mattappawalie, 30 April 2026

⁸⁰ Marwah, Ketua PKK Kelurahan Mattappawalie, , Kec. Pujananting, Kab. Barru, Sulsel, wawancara di rumah Ibu Marwah, 03 Juli 2026

⁸¹ Yuliana, Aparat kelurahan, Kec. Pujananting, Kab. Barru, Sulsel, wawancara di kantor kelurahan Mattappawalie, 30 April 2026.

⁸² Rijal, Aparat Kelurahan, , Kec. Pujananting, Kab. Barru, Sulsel, wawancara di kantor kelurahan Mattappawalie, 30 April 2026.

Masyarakat juga memberikan penilaian serupa. Ibu Astini, S. Pd., M. Pd., menyatakan:

“Sampai saat ini, belum ada inovasi atau program baru yang secara khusus dibuat oleh pemerintah kelurahan. Hal ini bisa dimaklumi mengingat lurah tersebut baru saja menjabat beberapa bulan.”⁸³

Bapak Juddin selaku tokoh masyarakat juga menyampaikan:

“belum, berhubung karena memang masih baru dalam rangka langkah-langkah atau program tersebut belum pernah.”⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan lurah masih berada pada tahap adaptasi sehingga inovasi dalam bidang pendidikan belum berkembang secara maksimal.

Menurut Sinaga dkk., kepemimpinan transformasional membutuhkan kemampuan inovasi untuk menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan⁸⁵. Oleh karena itu, inovasi menjadi aspek penting yang perlu dikembangkan dalam kepemimpinan lurah agar partisipasi masyarakat dapat meningkat secara lebih optimal.

2. Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pendidikan

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan pendidikan di lingkungan masyarakat. Partisipasi tersebut dapat berupa keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemberian tenaga, maupun dukungan moral dan material terhadap kegiatan pendidikan. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa masyarakat Kelurahan

⁸³ Astini, S. Pd., M. Pd., Masyarakat, Kel. Mattappawalie, Kec. Pujananting, Kab. Barru, Sulsel, wawancara di rumah Ibu Astini, 5 Mei 2026.

⁸⁴ Juddin, Tokoh Masyarakat, Kel. Mattappawalie, Kec. Pujananting, Kab. Barru, Sulsel, wawancara di rumah bapak Juddin, 2 Mei 2026

⁸⁵ Sinaga, Sofiah, Nur'Aida, Delpi Aprilinda, dan Alim Putra Budiman. “Konsep Kepemimpinan Transformasional.” *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia* 1, no. 2 (2021): 123–130

Mattappawalie memiliki kepedulian terhadap pendidikan, meskipun tingkat partisipasinya masih berbeda-beda pada setiap masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, bentuk partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan dapat dilihat melalui beberapa aspek berikut:

a. Partisipasi dalam Perencanaan

Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan kegiatan pendidikan masih tergolong rendah. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat dan masyarakat setempat, diketahui bahwa belum terdapat program pendidikan yang terstruktur dari pemerintah kelurahan sehingga masyarakat belum banyak dilibatkan dalam proses perencanaan kegiatan pendidikan.

Ibu Astini, S. Pd., M. Pd., selaku masyarakat menyatakan:

“Sampai saat ini, belum ada inovasi atau program baru yang secara khusus dibuat oleh pemerintah kelurahan. Hal ini bisa dimaklumi mengingat lurah tersebut baru saja menjabat beberapa bulan. Karena belum ada program khusus atau inovasi baru yang diluncurkan dari pihak kelurahan, belum ada respon spesifik yang bisa dinilai. Namun, melihat inisiatif masyarakat yang sudah mau menyumbang lewat Komite Sekolah, kemungkinan besar masyarakat akan memberikan respon yang sangat positif dan antusias jika nantinya ada program resmi dari lurah”⁸⁶

Bapak Juddin selaku tokoh masyarakat juga menyampaikan:

“Karena lurah masih baru, program pendidikan yang melibatkan masyarakat secara langsung belum banyak dilakukan.”⁸⁷

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ketua PKK Kelurahan Mattappawalie, Ibu Marwah, yang menyatakan:

⁸⁶ Astini, S. Pd., M. Pd., Masyarakat, Kel. Mattappawalie, Kec. Pujananting, Kab. Barru, Sulsel, wawancara di rumah Ibu Astini, 5 Mei 2026.

⁸⁷ Juddin, Tokoh Masyarakat, Kel. Mattappawalie, Kec. Pujananting, Kab. Barru, Sulsel, wawancara di rumah bapak Juddin, 2 Mei 2026

"PKK selalu dilibatkan dalam kegiatan musyawarah yang membahas program-program kelurahan, termasuk yang berkaitan dengan pendidikan. Kami menyampaikan berbagai usulan dan aspirasi masyarakat, seperti penyuluhan kepada orang tua, pencegahan anak putus sekolah, serta penyediaan fasilitas yang dapat menunjang kegiatan belajar anak."⁸⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan masih terbatas. Masyarakat lebih banyak menjadi penerima informasi dibandingkan terlibat secara langsung dalam penyusunan program pendidikan di lingkungan kelurahan.

Menurut World Bank, partisipasi masyarakat yang efektif tidak hanya melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan, tetapi juga dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan⁸⁹. Oleh karena itu, rendahnya partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam bidang pendidikan masih perlu ditingkatkan.

Selain itu, OECD menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dapat meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap program pembangunan sehingga program yang dijalankan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan⁹⁰. Dengan demikian, pemerintah kelurahan perlu membangun ruang partisipasi yang lebih terbuka agar masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam merencanakan kegiatan pendidikan.

b. Partisipasi dalam Pelaksanaan

Partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan kegiatan pendidikan tergolong cukup baik. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat cukup aktif

⁸⁸ Marwah, Ketua PKK Kelurahan Mattapawalie, , Kec. Pujananting, Kab. Barru, Sulse, wawancara di rumah Ibu marwah, 03 Juli 2026

⁸⁹ World Bank, *Improving Education Outcomes through Community Participation* (Washington, DC: World Bank Group, 2021)

⁹⁰ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Innovative Citizen Participation and New Democratic Institutions: Catching the Deliberative Wave* (Paris: OECD Publishing, 2022)

terlibat dalam kegiatan sekolah maupun kegiatan sosial yang berkaitan dengan pendidikan.

Ibu Suriani, S. Sos., selaku masyarakat menyatakan:

“masyarakat aktif jika ada kegiatan siswa orangtua siswa seperti mendorong anak nya ikut lomba atau masyarakat merespon semua program yang ada disekolah.”⁹¹

Bapak Nasir Selaku Tokoh Masyarakat menyatakan:

“Kalau ada kegiatan pendidikan atau musyawarah sekolah, masyarakat biasanya ikut hadir dan membantu.”⁹²

Selain itu, masyarakat juga memberikan dukungan terhadap kegiatan pembangunan fasilitas sekolah melalui komite sekolah. Ibu Astini, S. Pd., M. Pd., sebagai masyarakat menyatakan:

“Dana untuk mendukung pembangunan fisik sekolah. Bantuan ini biasanya disalurkan langsung secara mandiri melalui Komite Sekolah, bukan melalui perantara pemerintah kelurahan.”⁹³

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ketua PKK Kelurahan Mattappawalie, Ibu Marwah, yang menyatakan:

"Pada saat ada kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan, masyarakat biasanya ikut berpartisipasi, baik dalam kegiatan sekolah, penyuluhan, maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh PKK. Orang tua juga cukup antusias mendukung kegiatan anak-anak, seperti menghadiri pertemuan sekolah, mengikuti sosialisasi, dan membantu apabila ada kegiatan yang membutuhkan keterlibatan masyarakat.”⁹⁴

⁹¹ Suriani, S. Sos., Masyarakat, Kel. Matappawalie, Kec. Pujananting, Kab. Barru, Sulsel, wawancara, dirumah ibu suriani 4 Mei 2026

⁹² Nasir, tokoh masyarakat, Kel. Mattappawalie, Kec. Pujananting, Kab. Barru, Sulsel, wawancara dirumah bapak Nasir, 2 Mei 2026.

⁹³ Astini, S. Pd., M. Pd., Masyarakat, Kel. Mattappawalie, Kec. Pujananting, Kab. Barru, Sulsel, wawancara dirumah Ibu Astini, 5 Mei 2026.

⁹⁴ Marwah, Ketua PKK Kelurahan Mattappawalie, , Kec. Pujananting, Kab. Barru, Sulsel, wawancara di rumah Ibu marwah, 03 Juli 2026

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kepedulian terhadap perkembangan pendidikan di lingkungan mereka. Bentuk partisipasi tersebut dilakukan secara swadaya oleh masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap pendidikan anak-anak.

Berdasarkan hasil observasi, keterlibatan masyarakat terlihat pada kegiatan kerja bakti sekolah, Sumbangan komite sekolah, serta dukungan masyarakat terhadap kegiatan siswa di sekolah. Masyarakat juga memberikan dukungan terhadap kegiatan perlombaan dan kegiatan sosial pendidikan lainnya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat lebih mudah berpartisipasi pada kegiatan yang bersifat langsung dan nyata dibandingkan pada tahap perencanaan program. Partisipasi seperti ini mencerminkan adanya hubungan sosial yang cukup baik antara masyarakat dan lembaga pendidikan.

Lestari menjelaskan bahwa pembangunan berbasis masyarakat akan berhasil apabila masyarakat terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sosial, termasuk pendidikan⁹⁵. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pendidikan menunjukkan adanya kesadaran sosial masyarakat terhadap pentingnya pendidikan bagi generasi muda.

c. Partisipasi dalam Bentuk Tenaga

Partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam membantu berbagai kegiatan pendidikan di lingkungan sekitar. Berdasarkan hasil observasi, masyarakat sering membantu kegiatan sekolah secara langsung, baik dalam bentuk tenaga maupun kerja sama sosial.

Bapak Nasir selaku tokoh masyarakat juga menjelaskan:

⁹⁵ P. Lestari, "Community-Based Development dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan," *Jurnal Pembangunan Masyarakat* 9, no. 2 (2022): 89–98

“Kalau ada kegiatan pendidikan atau musyawarah sekolah, masyarakat biasanya ikut hadir dan membantu.”⁹⁶

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ketua PKK Kelurahan Mattappawalie, Ibu Marwah, yang menyatakan:

"Masyarakat cukup aktif membantu apabila ada kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan. Misalnya pada kegiatan penyuluhan, kerja bakti, maupun kegiatan sekolah, ibu-ibu PKK bersama masyarakat ikut membantu sesuai dengan kemampuan masing-masing agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar.”⁹⁷

Partisipasi tenaga tersebut terlihat pada kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan sekolah, membantu kegiatan perlombaan siswa, serta keterlibatan masyarakat dalam mendukung kegiatan sosial pendidikan lainnya. Keterlibatan masyarakat dalam bentuk tenaga menunjukkan bahwa masyarakat memiliki rasa kepedulian terhadap perkembangan pendidikan di lingkungan mereka.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga masih dilakukan secara sederhana dan belum terorganisasi secara formal oleh pemerintah kelurahan. Namun demikian, partisipasi tersebut menunjukkan adanya budaya gotong royong yang masih terjaga di lingkungan masyarakat.

UNESCO menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pendidikan merupakan salah satu bentuk pendidikan berbasis masyarakat yang dapat memperkuat hubungan sosial dan meningkatkan kualitas pendidikan⁹⁸. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga perlu terus didorong agar masyarakat semakin aktif dalam mendukung kegiatan pendidikan.

⁹⁶ Nasir, tokoh masyarakat, Kel. Mattappawalie, Kec. Pujananting, Kab. Barru, Sulsel, wawancara di rumah bapak Nasir, 2 Mei 2026.

⁹⁷ Marwah, Ketua PKK Kelurahan Mattappawalie, , Kec. Pujananting, Kab. Barru, Sulsel, wawancara di rumah Ibu marwah, 03 Juli 2026

⁹⁸ UNESCO, *Community-Based Education Report* (Paris: UNESCO Publishing, 2022)

d. Partisipasi dalam Bentuk Dukungan Moral dan Material

Selain tenaga, masyarakat juga memberikan dukungan moral dan material terhadap kegiatan pendidikan. Dukungan moral terlihat dari dorongan orang tua kepada anak-anak untuk tetap melanjutkan pendidikan meskipun menghadapi berbagai keterbatasan ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara Ibu Irmaevina selaku Masyarakat menyatakan:

“Orang tua tetap mendorong anak-anak supaya melanjutkan sekolah walaupun kondisi ekonomi kadang sulit.”⁹⁹

Bapak Nasir juga selaku tokoh Masyarakat menjelaskan:

“Masyarakat sebenarnya peduli terhadap pendidikan, hanya saja kadang terkendala biaya.”¹⁰⁰

Selain dukungan moral, masyarakat juga memberikan dukungan material berupa bantuan dana dan bantuan pembangunan fasilitas sekolah melalui komite sekolah.

Ibu Astini selaku Masyarakat menyatakan:

“Partisipasi masyarakat sudah ada dan berjalan secara swadaya. Bentuk nyata partisipasinya adalah berupa pemberian bantuan materi”¹⁰¹

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ketua PKK Kelurahan Mattappawalie, Ibu Marwah, yang menyatakan:

"Masyarakat di Kelurahan Mattappawalie cukup peduli terhadap pendidikan anak. Bentuk dukungan yang diberikan bukan hanya berupa bantuan materi melalui

⁹⁹ Irmaevina Masyarakat, Kec. Pujananting, Kab. Barru, Sulsel, wawancara di rumah ibu Irmaevina, 2 Mei 2026.

¹⁰⁰ Nasir, tokoh masyarakat, Kel. Mattappawalie, Kec. Pujananting, Kab. Barru, Sulsel, wawancara di rumah bapak Nasir, 2 Mei 2026.

¹⁰¹ Astini, S. Pd., M. Pd., Masyarakat, Kel. Mattappawalie, Kec. Pujananting, Kab. Barru, Sulsel, wawancara di rumah Ibu Astini, 5 Mei 2026.

komite sekolah atau kegiatan sosial, tetapi juga dukungan moral dengan terus memberikan semangat kepada anak-anak agar tetap bersekolah. Melalui kegiatan PKK, kami juga selalu mengingatkan para orang tua agar tetap mendampingi dan memotivasi anak dalam belajar meskipun menghadapi keterbatasan ekonomi.”¹⁰²

Berdasarkan hasil observasi, dukungan material masyarakat dilakukan secara swadaya dan lebih banyak diberikan kepada sekolah-sekolah yang membutuhkan bantuan fasilitas pendidikan. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran untuk membantu perkembangan pendidikan di lingkungan mereka.

Namun demikian, dukungan masyarakat tersebut masih bersifat individual dan belum terkoordinasi secara maksimal oleh pemerintah kelurahan. Oleh karena itu, diperlukan program yang mampu mengorganisir partisipasi masyarakat agar dukungan yang diberikan dapat lebih terarah dan memberikan dampak yang lebih besar terhadap pembangunan pendidikan.

Menurut Rahman, partisipasi masyarakat yang terorganisasi dengan baik dapat meningkatkan efektivitas pembangunan sosial dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat¹⁰³. Dengan demikian, pemerintah kelurahan perlu membangun program pemberdayaan masyarakat agar partisipasi dalam bidang pendidikan dapat berkembang secara optimal.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan di Kelurahan Mattappawalie. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor ekonomi, lingkungan sosial, kesadaran masyarakat, dan kepemimpinan lurah.

¹⁰² Marwah, Ketua PKK Kelurahan Mattappawalie, , Kec. Pujananting, Kab. Barru, Sulsel, wawancara di rumah Ibu marwah, 03 Juli 2026

¹⁰³ A. Rahman, “Peran Pemerintah Lokal dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat,” *Jurnal Administrasi Publik* 10, no. 2 (2022): 115–124

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi hambatan utama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, diketahui bahwa sebagian masyarakat mengalami kesulitan dalam membiayai pendidikan anak-anak mereka.

Bapak Lurah Alwi S. H menyatakan:

“Kendala terbesar itu masalah ekonomi orang tua.”¹⁰⁴

Bapak Juddin selaku tokoh Masyarakat juga menyampaikan:

“Kadang anak-anak tidak melanjutkan sekolah karena faktor ekonomi keluarga.”¹⁰⁵

Ibu Suriani, S. Sos selaku Masyarakat juga menjelaskan:

“Bantuan berupa dana ada sebagian masyarakat tidak mampu jika ada program disekolah yang membutuhkan dana.”¹⁰⁶

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ketua PKK Kelurahan Mattappawalie, Ibu Marwah, yang mengungkapkan bahwa masih terdapat anak-anak yang mengalami hambatan dalam melanjutkan pendidikan karena keterbatasan ekonomi keluarga. Kondisi tersebut juga terlihat dalam Musrenbang Anak Tahun 2025 yang mencatat masih adanya anak putus sekolah akibat faktor ekonomi. Beliau menyampaikan:

"Faktor ekonomi masih menjadi kendala bagi sebagian masyarakat dalam menyekolahkan anaknya. Masih ada anak yang kesulitan melanjutkan

¹⁰⁴ Alwi, S. H., lurah Mattappawalie, Kec. Pujananting, Kab. Barru, Sulsel, wawancara dikantor kelurahan Mattappawalie, 30 April 2026.

¹⁰⁵ Juddin, Tokoh Masyarakat, Kel. Mattappawalie, Kec. Pujananting, Kab. Barru, Sulsel, wawancara dirumah bapak Juddin, 2 Mei 2026

¹⁰⁶ Suriani, S. Sos., Masyarakat, Kel. Matappawalie, Kec. Pujananting, Kab. Barru, Sulsel, wawancara, dirumah ibu suriani 4 Mei 2026.

pendidikan karena keterbatasan biaya, sehingga perlu adanya perhatian dan dukungan dari pemerintah maupun masyarakat."¹⁰⁷

Berdasarkan hasil penelitian, kondisi ekonomi masyarakat yang masih tergolong menengah ke bawah menyebabkan sebagian masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Hal tersebut menyebabkan beberapa anak memilih tidak melanjutkan pendidikan atau bekerja membantu orang tua.

Berdasarkan hasil observasi kegiatan Musrenbang Anak Tahun 2025, pemerintah kelurahan bersama Ketua PKK berupaya mengatasi kendala ekonomi dengan mengusulkan pemberian bantuan biaya pendidikan bagi anak-anak yang berprestasi agar tidak terhambat melanjutkan pendidikan karena kondisi ekonomi keluarga. Selain itu, pemerintah kelurahan terus memberikan motivasi kepada orang tua agar tetap memprioritaskan pendidikan anak, sedangkan Ketua PKK bersama kader PKK melakukan pendataan keluarga kurang mampu dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan bagi anak.

Sari dan Nugroho menjelaskan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap akses pendidikan dan keberlanjutan sekolah anak¹⁰⁸. Oleh karena itu, kondisi ekonomi menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan.

b. Faktor Lingkungan

Lingkungan sosial juga menjadi faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh

¹⁰⁷ Marwah, Ketua PKK Kelurahan Mattapawalie, , Kec. Pujananting, Kab. Barru, Sulsel, wawancara di rumah Ibu marwah, 03 Juli 2026

¹⁰⁸ D. Sari dan R. Nugroho, "Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi terhadap Akses Pendidikan di Indonesia," *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan* 8, no. 1 (2023): 44–53

informasi bahwa pergaulan bebas, media sosial, dan penggunaan gadget mempengaruhi motivasi anak-anak untuk belajar.

Pak Bahtiar selaku aparat kelurahan menyatakan:

“Media sosial dan pergaulan sangat mempengaruhi anak-anak sekarang.”¹⁰⁹

Ibu Suriani, S. Sos, selaku masyarakat juga menjelaskan:

“Pergaulan dan penggunaan gadget membuat anak-anak malas belajar.”¹¹⁰

Pak Rijal menyampaikan:

“Lingkungan dan media sosial cukup berpengaruh terhadap pendidikan anak-anak.”¹¹¹

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ketua PKK Kelurahan Mattappawalie, Ibu Marwah, yang menjelaskan bahwa lingkungan keluarga mempunyai pengaruh yang besar terhadap pendidikan anak. Berdasarkan hasil Musrenbang Anak Tahun 2025 masih ditemukan permasalahan berupa pernikahan usia dini, anak putus sekolah, kekerasan terhadap anak, pergaulan bebas, serta kurangnya fasilitas bermain bagi anak. Beliau menyampaikan:

"Lingkungan keluarga sangat menentukan masa depan pendidikan anak. Masih ada kasus pernikahan usia dini, anak putus sekolah, serta kurangnya pengawasan terhadap pergaulan anak sehingga perlu perhatian bersama dari orang tua, pemerintah, dan masyarakat."¹¹²

¹⁰⁹ Bahtiar, Aparat Kelurahan, Kec. Pujananting, Kab. Barru, Sulsel, wawancara dikantor kelurahan Mattappawalie, 30 April 2026.

¹¹⁰ Suriani, S. Sos., Masyarakat, Kel. Matappawalie, Kec. Pujananting, Kab. Barru, Sulsel, wawancara, di rumah ibu suriani 4 Mei 2026.

¹¹¹ Rijal, Aparat Kelurahan, , Kec. Pujananting, Kab. Barru, Sulsel, wawancara dikantor kelurahan Mattappawalie, 30 April 2026.

¹¹² Marwah, Ketua PKK Kelurahan Mattapawalie, , Kec. Pujananting, Kab. Barru, Sulsel, wawancara di rumah Ibu marwah, 03 Juli 2026

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa lingkungan keluarga dan lingkungan sosial menjadi faktor penting yang memengaruhi keberhasilan pendidikan anak. Oleh karena itu, lurah bersama Ketua PKK melakukan berbagai upaya, antara lain memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya pernikahan usia dini, mengarahkan anak putus sekolah untuk mengikuti pendidikan nonformal Paket A, Paket B, dan Paket C, memberikan penyuluhan kepada orang tua mengenai pencegahan kekerasan terhadap anak, serta mengusulkan penyediaan fasilitas bermain dan sarana olahraga yang layak bagi anak-anak. Ketua PKK juga aktif melakukan penyuluhan kepada keluarga agar meningkatkan pengawasan terhadap pergaulan anak.

Berdasarkan hasil penelitian, pengaruh lingkungan sosial menyebabkan sebagian anak kurang fokus terhadap pendidikan sehingga mempengaruhi motivasi belajar mereka. Selain itu, perkembangan teknologi dan media sosial juga menyebabkan anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu di luar kegiatan belajar.

Hidayat menjelaskan bahwa lingkungan sosial dan persepsi masyarakat sangat mempengaruhi partisipasi pendidikan masyarakat¹¹³. Oleh karena itu, lingkungan sosial menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kesadaran pendidikan masyarakat.

c. Faktor Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan juga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi

¹¹³ M. Hidayat, "Persepsi Masyarakat terhadap Pendidikan Tinggi dan Dampaknya terhadap Partisipasi Sekolah," *Jurnal Sosial Humaniora* 6, no. 3 (2021): 201–210

bahwa masih terdapat sebagian masyarakat yang menganggap pendidikan belum terlalu penting.

Bapak Alwi, S. H selaku lurah menyatakan:

“opini yang berkembang di masyarakat itu dia sudah sekolah tapi ujung-ujungnya nganggur jadi petani jadi itu masyarakat termotivasi bahwa tidak usah sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya menganggur.”¹¹⁴

Bapak Nasir selaku tokoh Masyarakat juga menyampaikan:

“Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan masih menjadi kendala.”¹¹⁵

Ibu Astini juga menjelaskan bahwa:

“Faktor utamanya saat ini adalah kesadaran mandiri masyarakat akan pentingnya pendidikan dan kelayakan fasilitas sekolah untuk anak-anak mereka. Namun, faktor kepemimpinan dan ketersediaan program dari pemerintah setempat juga sangat berpengaruh. Saat ini, karena belum ada program pendorong dari kelurahan, partisipasi masyarakat menjadi kurang maksimal dan hanya terbatas pada inisiatif masing-masing orang tua murid.”

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ketua PKK Kelurahan Mattappawalie, Ibu Marwah, yang menyampaikan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan perlu terus ditingkatkan. Menurut beliau:

"Kami terus mengingatkan masyarakat bahwa pendidikan merupakan investasi bagi masa depan anak. Kesadaran orang tua perlu ditingkatkan agar mereka lebih aktif mendukung dan mengawasi pendidikan anak-anaknya."¹¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, masih terdapat sebagian orang tua yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya keterlibatan mereka dalam

¹¹⁴ Alwi, S. H., lurah Mattappawalie, Kec. Pujananting, Kab. Barru, Sulsel, wawancara di kantor kelurahan Mattappawalie, 30 April 2026.

¹¹⁵ Nasir, tokoh Masyarakat, Kel. Mattappawalie, Kec. Pujananting, Kab. Barru, Sulsel, wawancara di rumah bapak Nasir, 2 Mei 2026.

¹¹⁶

pendidikan anak. Oleh karena itu, upaya lurah bersama Ketua PKK melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan mengenai pentingnya pendidikan, pencegahan pernikahan usia dini, pengawasan terhadap pergaulan anak, serta pentingnya keterlibatan orang tua dalam mendukung keberhasilan pendidikan anak.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pola pikir masyarakat masih mempengaruhi motivasi pendidikan anak-anak. Sebagian masyarakat masih memandang pendidikan hanya sebagai sarana mencari pekerjaan, bukan sebagai kebutuhan penting dalam kehidupan sosial.

Menurut Hidayat, persepsi masyarakat terhadap pendidikan sangat mempengaruhi tingkat partisipasi sekolah dan keberlanjutan pendidikan anak¹¹⁷. Oleh karena itu, diperlukan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan.

d. Faktor Kepemimpinan

Kepemimpinan lurah juga menjadi faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat menilai bahwa lurah memiliki kepedulian terhadap pendidikan, namun belum terdapat program inovatif yang mampu meningkatkan partisipasi masyarakat secara maksimal.

Ibu Astini sebagai Masyarakat menyatakan:

“Masyarakat masih menunggu program resmi dari kelurahan.”¹¹⁸

Bapak Juddin selaku tokoh masyarakat juga menyampaikan:

¹¹⁷ M. Hidayat, “Persepsi Masyarakat terhadap Pendidikan Tinggi dan Dampaknya terhadap Partisipasi Sekolah,” *Jurnal Sosial Humaniora* 6, no. 3 (2021): 201–210

¹¹⁸ Astini, S. Pd., M. Pd., Masyarakat, Kel. Mattappawalie, Kec. Pujananting, Kab. Barru, Sulsel, wawancara di rumah Ibu Astini, 5 Mei 2026.

“belum, berhubung karena memang masih baru dalam rangka langkah-langkah atau program tersebut belum pernah.”¹¹⁹

Hal tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan lurah memiliki pengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat. Kepemimpinan yang aktif, inovatif, dan komunikatif dapat mendorong masyarakat untuk lebih terlibat dalam kegiatan pendidikan.

Sinaga dkk. menjelaskan bahwa kepemimpinan transformasional mampu meningkatkan partisipasi masyarakat melalui motivasi, komunikasi, dan inovasi sosial¹²⁰. Oleh karena itu, kepemimpinan lurah menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan.

Dari beberapa faktor diatas dari hasil wawancara terdapat juga beberapa faktor dari hasil observasi pada musrembang anak yaitu sebagai:

Berdasarkan hasil observasi pada kegiatan musrembang anak peneliti menemukan beberapa faktor sosial yang mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan, seperti masih adanya pernikahan usia dini, anak putus sekolah, pergaulan bebas, serta perilaku merokok pada usia sekolah. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah kelurahan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan.

C. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan menghubungkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan teori yang relevan mengenai kepemimpinan lurah dan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan di Kelurahan Mattappawalie. Pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui

¹¹⁹ Juddin, Tokoh Masyarakat, Kel. Mattappawalie, Kec. Pujananting, Kab. Barru, Sulsel, wawancara di rumah bapak Juddin, 2 Mei 2026

¹²⁰ Sofiah Sinaga, Nur'Aida, Delpi Aprilinda, dan Alim Putra Budiman, “Konsep Kepemimpinan Transformasional,” *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia* 1, no. 2 (2021): 123–130

bagaimana peran kepemimpinan lurah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan masyarakat dalam bidang pendidikan.

1. Kepemimpinan Lurah dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Bidang Pendidikan

Kepemimpinan lurah merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian, kepemimpinan lurah di Kelurahan Mattappawalie menunjukkan adanya upaya aktif dalam memberikan motivasi, membangun komunikasi, melakukan koordinasi, serta memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam mendukung pendidikan.

Peran lurah sebagai motivator terlihat dari upaya lurah dalam memberikan edukasi dan dorongan kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anak. Lurah secara aktif menyampaikan pesan-pesan pendidikan dalam kegiatan rapat, musyawarah, maupun kegiatan sosial masyarakat lainnya. Bentuk motivasi tersebut dilakukan melalui pendekatan persuasif agar masyarakat memiliki kesadaran mengenai pentingnya pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara, lurah menyampaikan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara dan pemerintah kelurahan memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar anak-anak tetap melanjutkan pendidikan. Selain itu, lurah juga berupaya memberikan solusi kepada masyarakat yang mengalami kendala ekonomi dengan mengarahkan mereka kepada program bantuan pendidikan maupun sekolah gratis.

Peran motivasi tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan lurah tidak hanya berorientasi pada pelayanan administratif, tetapi juga memiliki kepedulian sosial terhadap perkembangan pendidikan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan teori kepemimpinan partisipatif yang dikemukakan oleh Wibowo bahwa seorang

pemimpin lokal harus mampu membangun keterlibatan masyarakat melalui komunikasi aktif dan pendekatan sosial yang dekat dengan masyarakat¹²¹. Dengan adanya komunikasi yang baik, masyarakat akan lebih mudah menerima arahan dan motivasi yang diberikan oleh pemerintah.

Selain sebagai motivator, lurah juga menjalankan peran sebagai fasilitator dalam mendukung kegiatan pendidikan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemerintah kelurahan membantu masyarakat dalam mencari solusi pendidikan, seperti membantu akses beasiswa, mengarahkan masyarakat kepada sekolah rakyat, serta menyediakan fasilitas pendidikan berupa perpustakaan dan taman baca.

Keberadaan perpustakaan dan taman baca menunjukkan adanya perhatian pemerintah kelurahan terhadap peningkatan literasi masyarakat. Meskipun fasilitas tersebut masih sederhana, namun keberadaannya memberikan manfaat bagi masyarakat terutama anak-anak dalam memperoleh akses bacaan dan pengetahuan tambahan di luar sekolah.

Peran lurah sebagai fasilitator menunjukkan bahwa pemerintah kelurahan berusaha menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan masyarakat. Hal ini sesuai dengan konsep *community-based development* yang menjelaskan bahwa pemerintah memiliki peran sebagai fasilitator dalam membantu masyarakat meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan dan pemberdayaan sosial¹²². Dengan demikian, keberadaan fasilitas pendidikan menjadi salah satu bentuk nyata dukungan pemerintah kelurahan terhadap peningkatan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan.

¹²¹ Wibowo, T. "Kepemimpinan Partisipatif dalam Pemerintahan Lokal." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 12, no. 1 (2024): 67–75

¹²² Lestari, P. "Community-Based Development dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan." *Jurnal Pembangunan Masyarakat* 9, no. 2 (2022): 89–98

Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa lurah memiliki kemampuan komunikasi yang cukup baik dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Pemerintah kelurahan menggunakan berbagai media komunikasi seperti rapat masyarakat, media sosial, grup WhatsApp, dan kepala lingkungan untuk menyampaikan informasi terkait pendidikan dan kegiatan sosial lainnya.

Masyarakat menilai bahwa lurah cukup responsif terhadap aspirasi dan keluhan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan adanya komunikasi dua arah antara pemerintah kelurahan dan masyarakat sehingga hubungan sosial yang terjalin menjadi lebih baik. Kemampuan komunikasi tersebut penting karena dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Selain komunikasi, lurah juga berperan sebagai koordinator dalam membangun kerja sama antara pemerintah kelurahan, pihak sekolah, tokoh masyarakat, dan orang tua siswa. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa lurah melakukan musyawarah bersama masyarakat ketika terdapat permasalahan pendidikan, seperti anak yang berpotensi putus sekolah atau masyarakat yang mengalami kesulitan biaya pendidikan.

Peran koordinasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kelurahan berupaya melibatkan berbagai pihak dalam menyelesaikan masalah pendidikan masyarakat. Bentuk koordinasi tersebut sejalan dengan konsep *collaborative governance* yang menjelaskan bahwa penyelesaian masalah publik membutuhkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat melalui komunikasi dan musyawarah bersama¹²³. Oleh karena itu, koordinasi yang dilakukan lurah dapat menjadi langkah positif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan.

Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa aspek inovasi dalam kepemimpinan lurah masih belum berkembang secara maksimal. Program-

¹²³ Chris Ansell dan Alison Gash, *Collaborative Governance Revisited* (New York: Routledge, 2020)

program yang dilakukan pemerintah kelurahan masih bersifat umum dan belum terdapat inovasi khusus yang terstruktur dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan. Hal ini dipengaruhi oleh masa jabatan lurah yang masih baru sehingga program-program inovatif belum sepenuhnya dijalankan.

Kurangnya inovasi menyebabkan partisipasi masyarakat masih berjalan secara sederhana dan belum terorganisasi secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan program-program baru yang lebih kreatif dan berkelanjutan agar keterlibatan masyarakat dalam bidang pendidikan dapat meningkat secara lebih maksimal.

Secara keseluruhan, kepemimpinan lurah di Kelurahan Mattappawalie sudah cukup baik dalam membangun motivasi, komunikasi, koordinasi, dan fasilitas masyarakat dalam bidang pendidikan. Akan tetapi, masih diperlukan peningkatan pada aspek inovasi program dan pemberdayaan masyarakat agar partisipasi masyarakat dapat berkembang secara lebih terarah dan berkelanjutan.

2. Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pendidikan

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat dalam mendukung kegiatan pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan hasil penelitian, partisipasi masyarakat di Kelurahan Mattappawalie sudah mulai terlihat meskipun bentuk partisipasinya masih sederhana dan belum terorganisasi secara sistematis.

Pada aspek perencanaan, keterlibatan masyarakat masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan belum adanya program resmi yang secara khusus melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan kegiatan pendidikan. Masyarakat cenderung hanya mengikuti kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah atau sekolah tanpa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan menunjukkan bahwa hubungan partisipatif antara pemerintah dan masyarakat masih perlu

ditingkatkan. Masyarakat belum sepenuhnya memiliki ruang untuk menyampaikan ide, saran, maupun kebutuhan mereka terkait pendidikan di lingkungan kelurahan.

Meskipun demikian, partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan tergolong cukup baik. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa masyarakat aktif membantu kegiatan sekolah, menghadiri rapat pendidikan, serta memberikan dukungan terhadap kegiatan sosial yang berkaitan dengan pendidikan.

Bentuk partisipasi masyarakat juga terlihat dalam bentuk bantuan material maupun tenaga. Masyarakat membantu pembangunan fasilitas sekolah melalui komite sekolah serta ikut terlibat dalam kegiatan gotong royong dan kegiatan sosial pendidikan lainnya. Selain itu, masyarakat juga memberikan dukungan moral kepada anak-anak agar tetap melanjutkan pendidikan meskipun menghadapi keterbatasan ekonomi.

Partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga menunjukkan adanya solidaritas sosial yang cukup baik di lingkungan masyarakat Kelurahan Mattappawalie. Masyarakat memiliki kepedulian terhadap pendidikan dan bersedia membantu kegiatan pendidikan secara sukarela.

Namun demikian, partisipasi masyarakat yang ada saat ini masih bersifat individual dan belum terorganisasi dengan baik. Belum adanya program pemberdayaan masyarakat yang terstruktur menyebabkan partisipasi masyarakat berjalan secara sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang jelas.

Oleh karena itu, pemerintah kelurahan perlu membangun program-program pemberdayaan masyarakat yang mampu mengorganisasi keterlibatan masyarakat dalam bidang pendidikan secara lebih sistematis. Dengan adanya program yang jelas, masyarakat akan lebih mudah untuk berpartisipasi dan memahami peran mereka dalam mendukung pendidikan.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan di Kelurahan Mattappawalie, yaitu faktor ekonomi, lingkungan sosial, kesadaran masyarakat, dan kepemimpinan lurah.

Faktor ekonomi menjadi salah satu hambatan utama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan. Banyak masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi menengah ke bawah sehingga kesulitan memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian anak berpotensi putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Keterbatasan ekonomi juga menyebabkan masyarakat lebih fokus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dibandingkan memikirkan pendidikan jangka panjang. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Sari dan Nugroho yang menjelaskan bahwa kondisi sosial ekonomi sangat mempengaruhi akses pendidikan masyarakat karena keterbatasan biaya menjadi hambatan utama dalam memperoleh pendidikan¹²⁴.

Selain faktor ekonomi, lingkungan sosial juga mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaruh pergaulan, penggunaan media sosial, dan penggunaan gadget yang berlebihan mempengaruhi motivasi belajar anak-anak.

Sebagian masyarakat menilai bahwa perkembangan teknologi memberikan dampak negatif terhadap perilaku anak karena menyebabkan anak lebih sering bermain media sosial dibandingkan belajar. Kondisi tersebut menyebabkan

¹²⁴ Sari, D. dan R. Nugroho. "Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi terhadap Akses Pendidikan di Indonesia." *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan* 8, no. 1 (2023): 44–53

sebagian anak kurang memiliki semangat belajar dan kurang fokus terhadap pendidikan.

Faktor kesadaran masyarakat juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa masih terdapat masyarakat yang menganggap pendidikan bukan satu-satunya jalan menuju kesuksesan sehingga perhatian terhadap pendidikan anak masih kurang maksimal.

Kurangnya kesadaran tersebut menunjukkan bahwa edukasi mengenai pentingnya pendidikan masih perlu ditingkatkan melalui pendekatan sosial dan komunikasi yang berkelanjutan dari pemerintah kelurahan.

Selain itu, faktor kepemimpinan lurah juga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan. Kepemimpinan yang aktif, komunikatif, dan responsif mampu meningkatkan motivasi masyarakat untuk ikut terlibat dalam kegiatan pendidikan. Sebaliknya, kurangnya inovasi program menyebabkan partisipasi masyarakat belum berkembang secara optimal.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat OECD yang menjelaskan bahwa kepemimpinan lokal yang efektif harus mampu membangun partisipasi masyarakat melalui inovasi, komunikasi, dan pelayanan publik yang responsif¹²⁵. Oleh karena itu, penguatan kepemimpinan lurah menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan.

¹²⁵ OECD, *Public Governance Review* (Paris: OECD Publishing, 2021)



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran kepemimpinan lurah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan di Kelurahan Mattappawalie, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan lurah telah berperan dalam mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, meskipun belum sepenuhnya optimal.

1. peran lurah sebagai motivator, fasilitator, komunikator, dan koordinator telah berjalan cukup baik. Lurah mampu memberikan dorongan kepada masyarakat untuk melanjutkan pendidikan, memfasilitasi bantuan pendidikan, menyampaikan informasi secara efektif, serta menjalin koordinasi dengan pihak sekolah dan masyarakat. Namun demikian, peran sebagai inovator masih belum berkembang secara signifikan sehingga program pendidikan berbasis masyarakat masih terbatas.
2. partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan cenderung lebih dominan pada tahap pelaksanaan dibandingkan tahap perencanaan. Masyarakat cukup aktif dalam bentuk dukungan tenaga, moral, dan material, namun keterlibatan dalam pengambilan keputusan masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih berada pada kategori partisipasi terbatas.
3. partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu kondisi ekonomi yang masih terbatas, pengaruh lingkungan sosial, tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, serta peran kepemimpinan lurah dalam mendorong keterlibatan masyarakat.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa kepemimpinan lurah memiliki pengaruh terhadap partisipasi masyarakat di bidang pendidikan, namun masih

diperlukan penguatan terutama pada aspek inovasi dan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Lurah Kelurahan Mattappawalie

Diharapkan dapat meningkatkan inovasi program berbasis pendidikan masyarakat, seperti forum pendidikan, gerakan literasi, atau program pemberdayaan pendidikan agar partisipasi masyarakat tidak hanya terbatas pada pelaksanaan, tetapi juga perencanaan.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan lebih aktif terlibat dalam setiap tahapan pembangunan pendidikan, khususnya dalam memberikan masukan dan ikut serta dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendidikan di lingkungan kelurahan.

3. Bagi Pemerintah dan Stakeholder Pendidikan

Perlu adanya penguatan dukungan program dan kebijakan yang mendorong peningkatan akses pendidikan serta pengurangan hambatan ekonomi yang masih menjadi faktor utama rendahnya partisipasi pendidikan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel lain seperti efektivitas program pendidikan atau peran lembaga pendidikan formal, serta menggunakan pendekatan kuantitatif agar hasil penelitian lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an. "Al-Baqarah" ayat 30.
- Al-Qur'an. "Ali-Imran" ayat 159.
- Al-Qur'an. "An-Nisa" ayat 58.
- Ansell, Chris dan Alison Gash. *Collaborative Governance Revisited*. New York: Routledge, 2020.
- Antonius. "Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Lengkenat Kecamatan Sepauk." *Fokus: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang* 22, no. 2 (2024): 397–406.
- Aprilianti, Silvia. "Gaya Kepemimpinan Lurah sebagai Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan." *Skripsi*. Malang: Universitas Brawijaya, 2014.
- Conyers, Diana. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991.
- Dwivedi, Yogesh K., dkk. "Digital Communication and Public Trust." 2021.
- Fitria, Happy dan Husaini. "Manajemen Kepemimpinan pada Lembaga Pendidikan Islam." *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan)*, 2019.
- Ghufron, Ghufron. "Teori-Teori Kepemimpinan." *Fenomena* (2020).
- Hadari, Nawawi. *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Hidayat, M. "Persepsi Masyarakat terhadap Pendidikan Tinggi dan Dampaknya terhadap Partisipasi Sekolah." *Jurnal Sosial Humaniora* 6, no. 3 (2021): 201.
- Imran, A., Anwar Parawangi, dan Muh Yusuf. "Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Balle Kecamatan Kahu Kabupaten Bone." *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)* 4, no. 6 (2023): 1323–1335.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2003.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2014.
- Kartono, K. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Rajawali Press, 2018.
- Khairuddin. *Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Liberty, 1992.
- Lestari, P. "Community-Based Development dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan." *Jurnal Pembangunan Masyarakat* 9, no. 2 (2022): 89.

- Masruhin, Salis dan Raudhoh. "Kepemimpinan Partisipatif: Literature Review." *Jurnal Al Mujaddid Humaniora* 8, no. 1 (2022): 82–90.
- OECD. *Innovative Citizen Participation and New Democratic Institutions: Catching the Deliberative Wave*. Paris: OECD Publishing, 2022.
- OECD. *Public Governance Review*. Paris: OECD Publishing, 2021.
- Permana, A. W. dan K. Karwanto. "Gaya Kepemimpinan Partisipatif dalam Upaya Meningkatkan Profesionalitas Guru." *Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan* 5, no. 1 (2020): 58.
- Permatasari, Melly Agustina dan Puji Hardati. "Relations, Structure, Values and Norms in the Society of the Target Industry in Kampung Sasirangan, Banjarmasin City." *Jurnal Socius* (2021).
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Putri, Ghina Yulida, Lidia Manalu, Martauli Hutagaol, dan Putri Rezki. "Peran Kepemimpinan Lurah untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Air Tawar Barat, Kota Padang." 2025.
- Qur'an, Al. "Al-Baqarah" ayat 30.
- Qur'an, Al. "Ali-Imran" ayat 159.
- Rahman, A. "Peran Pemerintah Lokal dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat." *Jurnal Administrasi Publik* 10, no. 2 (2022): 115.
- Raja, Mawar Indah Lumban. "Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan pada Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara." Skripsi. Medan: Universitas Medan Area, 2023.
- Ramadhani, Fitria. "Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan Desa di Pulau Karanrang Desa Mattiro Bulu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan." Skripsi. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2024.
- Rismayana, Bela. "Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Desa Mendik Makmur Kecamatan Longkali Kabupaten Paser." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 9, no. 1 (2021): 23–36.
- Sari, D. dan R. Nugroho. "Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi terhadap Akses Pendidikan di Indonesia." *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan* 8, no. 1 (2023): 44.
- Siagian, S. P. *Teori dan Praktik Kepemimpinan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2019.
- Sinabutar, T. L. "Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pembangunan Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang." 2024.

- Sinaga, Sofiah, Nur'Aida, Delpi Aprilinda, dan Alim Putra Budiman. "Konsep Kepemimpinan Transformasional." *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia* 1, no. 2 (2021): 123–130.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Suhardono. *Teori Peran, Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2023.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sugiyono. "Data dan Metoda Pengumpulan Data." *STEI Indonesia*, 2018.
- UNESCO. *Community-Based Education Report*. Paris: UNESCO Publishing, 2022.
- Undang-Undang. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Veithzal, Rivai dan Deddy Mulyadi. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2019.
- Wibowo, T. "Kepemimpinan Partisipatif dalam Pemerintahan Lokal." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 12, no. 1 (2024): 67.
- World Bank. *Community Participation Framework*. Washington, DC: World Bank Group, 2020.
- World Bank. *Improving Education Outcomes through Community Participation*. Washington, DC: World Bank Group, 2021.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Instrumen Penelitian

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS TARBIYAH Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : NURVADILAH JAMALUDDIN
 NIM : 2220203886231020
 FAKULTAS : TARBIYAH
 PROGRAM STUDI : MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
 JUDUL : PERAN KEPEMIMPINAN LURAH DALAM
 MENINGKATKANPARTISIPASIMASYARAKAT PADA BIDANG
 PENDIDIKAN DI KANTOR KELUARAN MATTAPPAWALIE KAB.
 BARRU

PEDOMAN WAWANCARA

Tabel Operasional Variabel Penelitian

No	Variabel	Indikator	Deskripsi Indikator	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1	Kepemimpinan Lurah	Lurah sebagai motivator	Upaya lurah memberikan dorongan dan	Lurah, perangkat	Wawancara, observasi

			motivasi kepada masyarakat agar peduli terhadap pendidikan	kelurahan, masyarakat	
		Lurah sebagai fasilitator	Peran lurah dalam menyediakan fasilitas, dukungan, dan bantuan terhadap kegiatan pendidikan di masyarakat	Lurah, perangkat kelurahan	Wawancara, observasi, dokumentasi
		Lurah sebagai komunikator	Cara lurah menyampaikan informasi program pendidikan kepada masyarakat serta menerima aspirasi masyarakat	Lurah, tokoh masyarakat, masyarakat	Wawancara
		Lurah sebagai koordinator	Kemampuan lurah dalam mengkoordinasikan tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam	Lurah, perangkat kelurahan, tokoh masyarakat	Wawancara, observasi

			kegiatan pendidikan		
		Lurah sebagai inovator	Upaya lurah dalam mengembangkan atau memperbaiki program pendidikan yang sudah ada	Lurah, perangkat kelurahan	Wawancara, observasi
2	Partisipasi Masyarakat	Partisipasi dalam perencanaan	Keterlibatan masyarakat dalam memberikan ide, saran, dan pendapat dalam perencanaan kegiatan pendidikan	Masyarakat , tokoh masyarakat	Wawancara
		Partisipasi dalam pelaksanaan	Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pendidikan seperti kerja sama, kegiatan sosial, dan dukungan terhadap program pendidikan	Masyarakat	Wawancara, Observasi

		Partisipasi dalam bentuk tenaga	Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam membantu kegiatan pendidikan	Masyarakat	Observasi, wawancara
		Partisipasi dalam bentuk dukungan moral atau material	Dukungan masyarakat berupa bantuan moral, ide, atau materi terhadap kegiatan pendidikan	Masyarakat , tokoh masyarakat	Wawancara
3	Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat	Faktor pendidikan	Tingkat pendidikan masyarakat yang mempengaruhi kesadaran terhadap pentingnya pendidikan	Masyarakat	Wawancara
		Faktor kepemimpinan	Pengaruh gaya kepemimpinan lurah terhadap partisipasi masyarakat	Lurah, masyarakat	Wawancara
		Faktor sosial ekonomi	Kondisi ekonomi masyarakat yang	Masyarakat	Wawancara

			mempengaruhi partisipasi dalam kegiatan pendidikan		
		Faktor kesadaran masyarakat	Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan	Masyarakat , tokoh masyarakat	Wawancara



Pedoman Wawancara Penelitian

Identitas Informan

Nama :

Jenis Kelamin :

Umur :

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

Tanggal Wawancara :

A. Pedoman Wawancara untuk Lurah

1. Bagaimana Bapak/Ibu memahami peran kepemimpinan sebagai lurah di Kelurahan Mattappawalie?
2. Apa saja tugas dan tanggung jawab Bapak/Ibu dalam memimpin masyarakat di kelurahan ini?
3. Bagaimana cara Bapak/Ibu mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan?
4. Bagaimana Bapak/Ibu memotivasi masyarakat agar peduli terhadap pendidikan?
5. Apakah kelurahan pernah melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan kepada masyarakat?
6. Apa saja bentuk dukungan kelurahan terhadap kegiatan pendidikan di masyarakat?

7. Apakah kelurahan menyediakan fasilitas atau bantuan untuk kegiatan pendidikan?
8. Bagaimana cara Bapak/Ibu menyampaikan informasi tentang program pendidikan kepada masyarakat?
9. Bagaimana Bapak/Ibu menerima aspirasi masyarakat terkait pendidikan?
10. Bagaimana Bapak/Ibu mengkoordinasikan tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam mendukung kegiatan pendidikan?
11. Apakah Bapak/Ibu pernah membuat atau mengembangkan program baru yang bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan?
12. Bagaimana proses munculnya ide atau inovasi tersebut?
13. Apa saja bentuk inovasi yang telah dilakukan kelurahan dalam mendukung pendidikan masyarakat?
14. Bagaimana respon masyarakat terhadap inovasi tersebut?
15. Apa saja kendala yang dihadapi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan?
16. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?

B. Pedoman Wawancara untuk Perangkat Kelurahan

1. Bagaimana menurut Anda kepemimpinan lurah di Kelurahan Mattappawalie?
2. Bagaimana peran lurah dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan?

3. Apakah lurah memberikan motivasi kepada masyarakat terkait pentingnya pendidikan?
4. Apakah lurah menyediakan dukungan atau fasilitas untuk kegiatan pendidikan masyarakat?
5. Apakah lurah memiliki inovasi atau program baru dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan?
6. Bagaimana respon masyarakat terhadap program atau inovasi tersebut?
7. Apa saja kendala yang dihadapi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan?

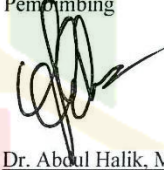
C. Pedoman Wawancara untuk Tokoh Masyarakat/Masyarakat

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai kepemimpinan lurah di Kelurahan Mattappawalie?
2. Apakah lurah sering mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan?
3. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan pendidikan di wilayah ini?

4. Apakah lurah pernah membuat program baru atau inovasi untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pendidikan?
5. Bagaimana respon masyarakat terhadap program tersebut?
6. Apa saja faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan?
7. Apa kendala yang dihadapi masyarakat dalam mendukung kegiatan pendidikan?

Parepare, 10 Desember 2025

Mengetahui,
Pembimbing


Dr. Abdul Halik, M.Pd.I
NIP. 197910052006041003

Lampiran 2 Surat Penetapan Pembimbing Skripsi



DEKAN FAKULTAS TARBIYAH
NOMOR : B-3299/n.39/FTAR.01/PP.00.9/10/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS TARBIYAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAEREPARE

- Menimbang
- Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi/tugas akhir mahasiswa FAKULTAS TARBIYAH IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa tahun 2025
 - Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk disertai tugas sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan :
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP-DIPA-025.04.2.307381/2024, tanggal 29 November 2024 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2025
 - Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: 74 TAHUN 2025 Tahun 2025, tanggal 21 Januari 2025 tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Tarbiyah;
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan :
- Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2025
 - Menunjuk saudara: **Dr. ABDUL HALIK, M.Pd.I**, sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir bagi mahasiswa :
Nama Mahasiswa : NURVADILAH JAMALUDDIN
NIM : 2220203886231020
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
Judul Penelitian : PERAN KEPEMIMPINAN LURAH DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA BIDANG PENDIDIKAN DI KANTOR KELURAHAN MATTAPPAWALIE KAB. BARRU
 - Tugas pembimbing adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi/tugas akhir;
 - Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
 - Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Parepare
Pada tanggal 08 Oktober 2025
Dekan,



Dr. Zulfah, S.Pd., M.Pd.
NIP 198304202008012010

Lampiran 3 Surat Izin Meneliti dari IAIN

		KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS TARBİYAH
Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404 PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id		
Nomor	: B-1001/In.39/FTAR.01/PP.00.9/04/2026	20 April 2026
Sifat	: Biasa	
Lampiran	: -	
H a l	: Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian	
 Yth. BUPATI BARRU Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di KAB. BARRU <i>Assalamu Alaikum Wr. Wb.</i> Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :		
Nama	: NURVADILAH JAMALUDDIN	
Tempat/Tgl. Lahir	: BARRU, 19 April 2004	
NIM	: 2220203886231020	
Fakultas / Program Studi	: Tarbiyah / Manajemen Pendidikan Islam	
Semester	: VIII (Delapan)	
Alamat	: LAMAPPA KAB. BARRU PROV. SULAWESI SELATAN	
 Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI BARRU dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul : PERAN KEPEMIMPINAN LURAH DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA BIDANG PENDIDIKAN DI KANTOR KELURAHAN MATTAPPAWALIE KAB. BARRU Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 20 April 2026 sampai dengan tanggal 20 Mei 2026. Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. <i>Wassalamu Alaikum Wr. Wb.</i>		
		 Dekan,  Dr. Zulfah, S.Pd., M.Pd. NIP 198304202008012010
 Tembusan : 1. Rektor IAIN Parepare		

Lampiran 4 Surat Izin Meneliti Dari DPMPTSP

**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU**
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Mal Pelayanan Publik Masiga Lt.1-3 Jl. H. Andi Iskandar Unru, gmail : dpmptsp.kb.barru@gmail.com

Barru, 23 April 2026

Nomor : 246/IP/DPMPTSP/IV/2026
Lampiran : -
Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Lurah Mattappawalie
Kec. Pujananting
di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare Nomor : B-1001 /In.39/FTAR.01/PP.00.9/04/2026 tanggal, 20 April 2026 perihal tersebut di atas, maka **Mahasiswa** di bawah ini :

Nama : Nurvadhil Jamaluddin
Nomor Pokok : 2220203886231020
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa
Alamat : Lingk. Padang Lampe Kel. Mattappawalie
Kec. Pujananting Kab. Barru

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal **24 April 2026 s/d 24 Mei 2026** dalam rangka penyusunan **Skrripsi**, dengan judul :

PERAN KEPEMIMPINAN LURAH DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA BIDANG PENDIDIKAN DI KANTOR KELURAHAN MATTAPPAWALIE KAB. BARRU

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Menaatikan semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1(satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat yang diterbitkan BSSC

5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak menaati ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (I) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.
Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

Kepala Dinas,

**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU**
(ditanda-tangani secara elektronik)
Dr. S. Rifatullah Akil, S.STP., M.M
Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19850701 200312 1 001

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Barru di Barru;
2. Kepala Bapperda Kab. Barru;
3. Camat Pujananting di Pujananting;
4. Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare Di Parepare;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

DPMPTSP
BARRU

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat yang diterbitkan BSSC

Lampiran 5 Surat Keterangan Selesai Meneli

 **PEMERINTAH KABUPATEN BARRU**
KECAMATAN PUJANANTING
KELURAHAN MATTAPPAWALIE
Alamat : Doidol Kel. Mattappawalie Kode Pos 90762

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 400.7.22.1/ 97 /Kel.Mattappawalie

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ALWIS.H
Nip : 19811022 201101 1 009
Jabatan : Lurah Mattappawalie

Dengan ini memberikan keterangan bahwa :

Nama : NURVADILAH JAMALUDDIN
Nomor Pokok : 2220203886231020
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
Pekerjaan / Lembaga : Mahasiswi
Alamat : Lingk Padang
Lampe, Kel. Mattappawalie, Kec. Pujananting Kab. Barru

Bahwa telah melakukan penelitian di Kantor Kelurahan Mattappawalie mulai Tanggal **24 April 2026 s/d 23 Mei 2026** Dengan Judul **"Peran Kepemimpinan Lurah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Bidang Pendidikan Di kantor Kelurahan Mattappawalie Kab. Barru"**

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Doidol, 06 Juni 2026
LURAH MATTAPPAWALIE

ALWIS.H
NIP. 19811022 201101 1 009



Lampiran 6 Hasil Musrembang Anak

**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
KECAMATAN MATTAPPAWALIE**
Alamat : Jln. Poros Doi-Doi - Gellireng No. Kode Pos 90762

Nomor : 400.2/02/Kel Mattappawalie
Sifat : -
Perihal : Musrembang Anak Tk. Kelurahan Mattappawalie Tahun 2025

Doi-Doi: 17 Januari 2025

Yth: 1. Pengurus Forum Anak Kel. Mattappawalie
2. Siswa – Slawi SMP di Kelurahan Mattappawalie
Di –
Tempat

Berdasarkan surat DPMOPKBPPPA Kab. Barru Nomor : 400.2/22/DPMOPKBPPPA tanggal 12 Januari 2025 perihal Jadwal Pelaksanaan Musrembang Anak, maka dengan ini disampaikan kepada Pengurus Forum Anak Kel. Mattappawalie untuk menghadiri Musrembang Anak Kel. Mattappawalie dan dirangsang pembentukan Pengurus Baru sekaligus Pembubaran Pengurus Lama yang insya allah akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 20 Januari 2025
Jam : 14.00 wita-Selesai
Tempat : Aula Gedung PKG Kec. Pujananting

Demikian disampaikan, atas perhatian dan keahliannya diucapkan banyak terima kasih.

KETUA FORUM ANAK
NIP. 9791007 200701 2 009

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Kepala DPMOPKBPPPA Kab. Barru (untuk dihadiri)
2. Camat Pujananting di Doi-Doi (Untuk dihadiri)
3. Pengurus Forum Anak Colli Puje Kab. Barru di Barru (untuk dihadiri)
4. Pengurus Forum Anak Kec. Pujananting di Tempat (Untuk dihadiri)

KOMISI Tahap Sipil Dan Kebebasan	PERMASALAHAN	DAFTAR USULAN
	1. Belum meratanya KIA 2. Tidak adanya tempat kumpul untuk forum anak Kelurahan Mattappawalie 3. Belum adanya baju persatuan yang dimiliki oleh forum anak kelurahan Mattappawalie	1. Meminta kepada Pemerintah setempat untuk meratakan KIA pada anak dibawah umur 18 Tahun 2. Meminta kepada Pemerintah setempat untuk memberikan secretariat untuk Forum Anak Kelurahan Mattappawalie 3. Mengajukan kepada Pemerintah setempat untuk membuatkan baju persatuan forum anak Kelurahan Mattappawalie
Lingkungan keluarga dan pengaruh alternatif	1. Di Kelurahan Mattappawalie banyak terjadi masalah pernikahan usia dini 2. Banyaknya anak yang putus sekolah di Kelurahan Mattappawalie 3. Kekerasan pada anak di Kelurahan Mattappawalie 4. Pergaulan Bebas pada anak di kelurahan Mattappawalie 5. Kurangnya fasilitas bermain di Kelurahan Mattappawalie	1. Melakukan edukasi kepada seluruh Masyarakat tentang pernikahan di usia dini. 2. Di daftar melalui Pendidikan Non Formal Paket A, B C sesuai dengan Tingkat pendidikannya. 3. Melakukan edukasi kepada orang tua terhadap kekerasan pada anak. 4. Meminta pada orang tua untuk memberikan didikan agar anak tidak bergaul dengan bebas. 5. Meminta kepada pemerintah untuk menyediakan fasilitas bermain seperti lapangan bermain dan lapangan olah raga.
Kesehatan dasar dan kesejahteraan	1. Masih banyaknya anak-anak yang merokok 2. Masih banyaknya anak sekolah yang menyala gunakan narkoba dan rokok 3. Masih banyaknya anak sekolah yang mengonsumsi makanan yang kurang sehat	1. Meminta kepada pemerintah untuk membuat kawasan di larang merokok di tempat umum 2. Memohon kepada pemerintah untuk memberikan fasilitas dan sosialisasi agar di lakukan pengawasan dan pemeriksaan pada setiap tempat tongkrongan yang ramai di huni anak- anak dan beberapa sekolah 3. Memohon kepada pemerintah untuk seminggu sekali dan melakukan sosialisasi kepada orang tua terkait cara penanganan dan penanggulangan anak stunting

Pendidikan dan kemiskinan suku lung dan kegiatan budaya	1. Tidak adanya taman bermain rumah anak di kelurahan mattappawalie 2. Tidak adanya wadah di kelurahan yang dapat memperkenalkan dan membudayakan budaya, sehingga kesadaran anak mengenai pentingnya budaya berbangsa menghilang (sanggar seni sebagainya) 3. Banyaknya anak-anak yang putus sekolah karena faktor ekonomi	1. Meminta kepada pemerintah untuk membangun taman bermain rumah anak di kelurahan mattappawalie 2. Meminta kepada pemerintah untuk diadakannya pembangunan sanggar tari dan sekuritas yang seni untuk menyebarkan budaya tari 3. Meminta kepada pemerintah untuk memberikan biaya siswa secara merata bagi anak yang berprestasi agar tidak terhalang faktor ekonomi
Perindungan khusus	1. Masih adanya jalan yang kurang bagus di daerah pange 2. Banjir serta tanah longsor 3. Masih banyaknya anak-anak yang kurang mendapatkan sosialisasi mengenai kenakalan remaja ataupun beretika dengan baik	1. Meminta kepada pemerintah perbaikan jalan di daerah pange 2. Mengadakan gotong royong di wilayah masing-masing serta pengadaan tempat sampah di daerah 3. Meminta kepada pemerintah mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai masalah tersebut.

Doi-doi, 20 Januari 2025
KETUA FORUM ANAK

VIKRIANSAH AL'ALIE

Lampiran 7 Kartu Kontrol Sumbangan Komite

KARTU KONTROL SUMBANGAN KOMITE						
TAHUN PELAJARAN 2025/2026						
NAMA SISWA		NAISILA LATIF				
KELAS		VIII.2				
SEMESTER		GANJIL/GENAP				
NO	BULAN	TANGGAL PEMBAYARAN	JUMLAH SETORAN	PARAF PENYETOR	PARAF BENDAHARA	KETERANGAN
1	JULI	05-07-2025	Rp 120.000	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
2	AGUSTUS					
3	SEPTEMBER					
4	OKTOBER					
5	NOVEMBER					
6	DESEMBER					
7	JANUARI	05-01-2026	Rp 120.000	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	tuas
8	FEBRUARI					
9	MARET					
10	APRIL					
11	MEI					
12	JUNI					
JUMLAH			Rp 240.000			
TUNGGAKAN						

Lampiran 8 Taman Baca



Lampiran 9 Perpustakaan Kelurahan



Lampiran 10 Dokumentasi



Wawancara Bersama Bapak Alwi, S. H (Lurah Mattappawalie



Wawancara Bersama Ibu Yuliana (Aparat Kelurahan)



Wawancara Bersama Bapak Bahtiar (Aparat Kelurahan)



Wawancara Bersama Bapak Rijal (Aparat Kelurahan)



Wawancara Bersama Bapak Juddin (Tokoh Masyarakat)



Wawancara Bersama Bapak Nasir (Tokoh Masyarakat)



Wawancara Bersama Ibu Irmaervina (Masyarakat)



Wawancara Bersama Ibu Suriani, S. Sos (Masyarakat)

BIODATA PENULIS



Nurvadilah Jamaluddin lahir di Doi-Doi pada tanggal 19 April 2004. Alamat Lingk Padang Lampe, Kel. Mattappawalie, Kec. Pujananting, Kab. Barru. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara, buah hati dari pasangan Jamaluddin dan Hasnaeni. Dalam perjalanan hidupnya, penulis menyadari bahwa setiap orang memiliki cerita dan perjuangannya masing-masing. Dari setiap proses yang dilalui, penulis belajar untuk tetap kuat, bersyukur, dan tidak menyerah dalam mengejar pendidikan serta impian di masa depan. Riwayat pendidikan penulis dimulai pada tahun 2009 di TK Dharmawanita Doi-Doi. Selanjutnya, pada tahun 2010 penulis melanjutkan pendidikan di SD Impres Padang Lampe dan menyelesaikannya selama enam tahun. Pada tahun 2016, penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Pujananting, kemudian melanjutkan pendidikan di SMKN 4 Barru pada tahun 2019 dan lulus pada tahun 2022. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah, dan berhasil menyelesaikan studi pada tahun 2026. Perjalanan selama menempuh pendidikan mengajarkan penulis bahwa tidak semua hal berjalan mudah, namun setiap proses selalu memiliki pelajaran berharga. Dengan doa, kesabaran, dan usaha, penulis percaya bahwa luka, lelah, dan air mata dapat menjadi kekuatan untuk terus melangkah menuju masa depan yang lebih baik.

Sebagai tugas akhir, penulis menyusun skripsi yang berjudul “Peran Kepemimpinan Lurah dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Bidang Pendidikan di Kantor Kelurahan Mattappawalie Kabupaten Barru.”